

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan ini akan dipaparkan dengan pertama-tama bagaimana gambaran umum terkait kerjasama Indonesia dan Turki. Dengan adanya kerjasama yang sudah ada di bab 2, maka di bab pembahasan ini akan membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia-Turki dalam industri pertahanannya. Kemudian penjelasan terkait kepentingan Indonesia dalam kerjasama pertahanan dengan Turki.

Respon yang diberikan Turki terhadap perjanjian kerjasama dengan Indonesia terkait industri pertahanan dalam pengembangan tank. Kerjasama tersebut bermula pada tahun 1958 yang diawali dengan perjanjian perdagangan dan dilanjutkan dengan perjanjian budaya pada 1973 dan seterusnya hingga kerjasama industri pertahanan pada tahun 2012 yang dimana merupakan tonggak penting dalam terjalinnya kemitraan strategis.<sup>1</sup>



**Gambar 2. Bisnis Indonesia-Turki, Dari Soekarno Hingga Kerjasama Pertahanan**

Sumber : (BisnisIndonesia.id, 2018).<sup>2</sup>

Pada dasarnya Turki memang merupakan negara yang bersahabat dengan Indonesia. Hubungan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut sudah mencakup pada sektor, seperti Sektor Ekonomi, Sektor Pertahanan, Sektor Perdagangan, Hingga Sektor Sosial dan Budaya. Kerjasama yang terjadi bukanlah sebuah penghalang melainkan sebagai tonggak kemajuan dalam industri pertahanan yang dilakukan dalam hubungan kerjasama bilateral.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Riza Sihbudi. (2007). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS Dan Israel Atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Hikmah.

<sup>2</sup> [Bisnis Indonesia Indonesia-Turki, Dari Soekarno Hingga Kerja Sama Pertahanan](#). Diakses pada 9 Juni 2023.

<sup>3</sup> Ahmad Junaidi. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*.

Turki dan Indonesia masih termasuk negara berkembang, hal tersebut bukanlah hal yang masalah bagi Turki dalam menjalin kerjasama industri pertahanan, namun Indonesia bisa membuktikan kualitas industri pertahanan dalam negerinya, seperti PT. Pindad yang itu merupakan perusahaan BUMN yang sangat maju dalam industri pertahanan, contoh yang dihasilkan seperti tank panser Anoa dan sebagainya.<sup>4</sup>

#### 4.1 Gambaran Umum Kerjasama Indonesia-Turki

Kerjasama antara Indonesia dan Turki telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus berkembang dalam berbagai bidang. Hubungan bilateral antara kedua negara didasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan dan saling pengertian, serta didorong oleh sejumlah kesamaan dalam hal budaya, sejarah, dan kepentingan strategis.<sup>5</sup>

Selain itu pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan pemerintah Turki di bidang ekonomi. Yang dimana hubungan kedua negara tersebut sangat kuat dibidang ekonomi. Hal tersebut memiliki potensi pasar yang besar dan saling melengkapi dalam sektor ekonomi tertentu. Khususnya untuk masalah kelistrikan yang dimana kerjasama energi ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kawasan kepulauan Indonesia melalui penggunaan *power ship* atau kapal penyedia pasokan listrik.<sup>6</sup>



**Gambar 3. Kapal Pembangkit Listrik dari Turki.**

Sumber : (Tribun Medan.com, 2022).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Yon Machmudi. (2021). *Timur Tengah Dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>5</sup> Muhammad Ayub. (2013). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>6</sup> Candra Fajri Ananda. (2018). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika Dan Strategi Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

<sup>7</sup> [Wow! Besarnya Kapal Pembangkit Listrik dari Turki yang Baru Tiba di Medan, Ini Foto-fotonya - Tribun-medan.com \(tribunnews.com\)](https://www.tribunnews.com). Diakses pada 9 Juni 2023.

Pemerintah Indonesia dan Turki telah menyetujui untuk mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi kedua Negara. Melalui negosiasi *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*. Kerjasama ini diharapkan akan mempererat hubungan kedua negara dalam segi ekonomi yang dapat meningkatkan investasi bilateral yang dilakukan kedua negara.<sup>8</sup>

Pada tanggal 31 Juli 2015, Rapat Presiden Jokowi dan Presiden Erdogan kembali digelar di Jakarta untuk membahas kerjasama dalam pembentukan IT-CEPA. Kedua negara berharap bisa mendirikan proyek IT-CEPA, dikarenakan kedua negara bisa memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Turki melalui IT-CEPA. Pembentukan IT-CEPA membutuhkan waktu yang cukup lama, hal itu terjadi sejak 2010 hingga 2017, IT-CEPA akhirnya ditandatangani di Ankara, Turki pada 7 Juli 2017. Penandatanganan IT-CEPA ini bisa menjadi pintu masuk bagi produk berkualitas tinggi Indonesia untuk memasuki perekonomian. Maka pemerataan listrik di daerah kepulauan Indonesia difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan energi dengan kapal pembangkit listrik milik Turki.<sup>9</sup>

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan hubungan Indonesia dan Turki semakin kuat dan erat khususnya dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini difokuskan untuk masalah kelistrikan yang terjadi di kepulauan Indonesia. Maka dibutuhkan penggunaan kapal penyedia pasokan listrik. Pembangkit listrik yang berbentuk kapal ini disebut sebagai Karadeniz Powership. *Marine Vessel Power Plant* dari Turki buatan tahun 2014 dan beroperasi di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun. Diperjanjian Karadeniz Powership akan menyediakan 540 Megawatt (MW) yang akan disalurkan ke lima wilayah Indonesia. Yaitu Amuran mendapatkan 120 MW, Sumatera Bagian Utara 240 MW, Kupang 60 MW, Ambon 60 MW, dan Lombok 60 MW.<sup>10</sup>

Alasan pemerintah memilih bekerjasama dengan Turki karena banyak daerah kepulauan di Indonesia yang masih mengalami krisis listrik. Hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, tetapi mempunyai masalah mendistribusikan listrik sehingga diperlukanlah kapal pembangkit listrik yang mudah dipindahkan menjadi solusi

---

<sup>8</sup> Kementerian Luar Negeri. (2020). Indonesia Turki Sepakati *Economic Cooperation* Sebagai Bagian Dari Indonesia-Turkey *Comprehensive Economic Partnership Agreement*. [Indonesia Turkiye Sepakati Economic Cooperation Sebagai Bagian Dari Indonesia Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id). Diakses pada 10 Juni 2023.

<sup>9</sup> Aminah Suhayya Lubis & Ibnu Zulian. (2021). Kerja Sama Indonesia-Turki Di Bidang Energi Era Pemerintahan Jokowi Tahun 2015-2020. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 2(1), 94-100.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 70-85.

utama dalam permasalahan tersebut. Perancangan pembangunan pembangkit listrik di atas kapal hanya membutuhkan waktu pembuatan selama 3 sampai 4 bulan atau jauh lebih cepat. Jika membangun generator di darat diperkirakan butuh 4 sampai 5 tahun. Karadeniz Powership merupakan perusahaan manufaktur pembangkit listrik ternama di negara Turki, sehingga memberikan peluang bagi industri Indonesia untuk menjadi bagian dari mitranya dalam membangun kapal pembangkit listrik dan dapat menjual produknya ke negara-negara ASEAN.<sup>11</sup>

Karadeniz Powerhip membangun 20 unit kapal berbentuk genset yang berkapasitas 36,8 MW atau bias dikategorikan sebagai *Seal Class*. Perusahaan asal Turki ini akan menggandeng galangan kapal Indonesia. Karadeniz juga memberdayakan para insinyur kapal lokal yang artinya siap melakukan program alih teknologi dalam skema *joint development*. Sebagai langkah awal dari program kerjasama Karadeniz dengan PT PAL, pembangunan empat kapal pembangkit listrik Indonesia yang pertama akan mulai di bangun di galangan kapal Indonesia. Penandatanganan pada perjanjian kerjasama ini juga telah dilakukan antara Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh dan Direktur Utama Karpowership Orhan Remzi Karadeniz dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Turki pada tahun 2017. Penandatanganan perjanjian kerjasama disaksikan juga oleh Menteri Ekonomi Turki Nihat Zeybekci dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.<sup>12</sup>

Kembali pada tahun sebelumnya yaitu pada bulan Oktober 2016 PT PAL sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut akan memiliki peluang untuk mengetahui kebutuhan listrik di Indonesia dan sekitarnya. Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kedua belah pihak untuk bersama-sama membangun, berkolaborasi, mentransfer teknologi, dan mengembangkan nilai-nilai lokal armada Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, PT. PAL akan membangun 4 pembangkit listrik kelas putri duyung Indonesia dengan kapasitas terpasang 36 hingga 80 MW untuk memberi daya di pulau Indonesia. Karpowership Turki mampu mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejauh ini, Karpowership Karadeniz  *Holding Company* telah memasang listrik sebesar 845 MW di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Ruptl) Pt Pln (Persero)*. [gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/38622-ruptl-pln-2021-2030.pdf](http://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/38622-ruptl-pln-2021-2030.pdf). Diakses pada 10 Juni 2023.

<sup>12</sup> Detik. (2016). Pemilik Kapal Genset Asal Turki Investasi Rp 13 Triliun di Republik Indonesia. [Pemilik Kapal 'Genset' Asal Turki Investasi Rp 13 T di RI \(detik.com\)](http://www.detik.com). Diakses pada 11 Juni 2023.

<sup>13</sup> PT. PAL. (2022). *Pt Pal Indonesia Perkuat Kerjasama Strategis Dengan Perusahaan Pertahanan Asal Turki. PT PAL Indonesia Perkuat Kerjasama Strategis dengan Perusahaan Pertahanan asal Turki – PT PAL Indonesia*. Diakses pada 11 Juni 2023.

Kerjasama bilateral energi dalam bentuk penyewaan kapal MVVP di beberapa wilayah kepulauan terpencil merupakan sebuah keuntungan tersendiri, mengingat masih banyak terjadi defisit listrik di beberapa wilayah kepulauan khususnya daerah terpencil. Pemerintah Indonesia melalui PT PLN (persero) berkerjasama dengan Karpowership, perusahaan penyewaan kapal pembangkit listrik *Marine Vessel Power Plant* (MVVP) asal Turki, selama 5 tahun. Karadeniz Holding merupakan perusahaan yang inovatif di bidang energi yang telah bergerak selama 20 tahun lamanya. Perusahaan Karpowership asal Turki telah mengoperasikan lebih dari 1.800 MW kapasitas terpasang secara global. Karadeniz Poweship memasok 15% kebutuhan listrik di Irak, 27% di Lebanon, 22% di Ghana, dan 16% di Zambia. Harga jual pembangkit listrik asal Turki jauh lebih murah daripada negara lain. Ditengah mendesaknya kebutuhan listrik dan situasi keamanan energi Indonesia, Karpowership menjadi pilihan yang ekonomis. Dari dalam kacamata hubungan bilateral, kerja sama disektor energi ini juga menjadi salah satu faktor yang akan mempererat hubungan kedua negara.<sup>14</sup>

Kebijakan pemilihan kapal MVVP Karadeniz Poweship Zeynep asal Turki oleh pihak Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dalam keadaan geografis, sosial, ekonomi, keadaan politik dan kelompok kepentingan yang ada disebuah negara yang dapat mempengaruhi setiap kebijakan luar negeri sebuah negara. Faktor Eksternal bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan luar negeri meliputi situasi internasional yang terjadi dan bagaimana pandangan negara lain terhadap sebuah negara yang membuat kebijakan luar negeri.<sup>15</sup>

Sementara itu, dalam kondisi geografis Indonesia yang notabene sebagai negara kepulauan turut mempengaruhi pemerataan konsumsi energi yang terus meningkat di setiap komponen masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan. Seperti diketahui, beberapa wilayah kepulauan Indonesia masih mengalami defisit energi salah satu diantaranya adalah defisit listrik yang tentunya berpengaruh pada produktivitas masyarakat. Berdasarkan pada fakta tersebut, pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo mencanangkan program 35.000 MW listrik untuk mengatasi defisit yang terjadi. Fokus utama dari program tersebut adalah menciptakan energi berkeadilan dengan maksud pemerataan energi di seluruh pelosok Indonesia. Tantangan tersebut merupakan bagian

---

<sup>14</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016). *Kapal Listrik Terapung Solusi Defisit Listrik*. [Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Kapal Listrik Terapung Solusi Defisit Listrik](#). Diakses pada 12 Juni 2023.

<sup>15</sup> Liputan6. (2015). *Pln Sewa Pembangkit Listrik Terapung Dari Turki*. [PLN Sewa Pembangkit Listrik Terapung dari Turki - Bisnis Liputan6.com](#). Diakses pada 12 Juni 2023.

dari pada rancangan kebijakan energi nasional yang berfokus pada upaya penjaminan pasokan energi.<sup>16</sup>

Tantangan daripada kondisi geografis Indonesia terkait energi utamanya adalah terkait distribusi. Sebagai negara kepulauan di perlukan sebuah teknologi energi yang *mobile* dan *transportable*. Berangkat dari fakta tersebut pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan kerjasama di bidang energi melalui penyewaan kapal MVVP yang akan menyuplai kebutuhan energi listrik di beberapa wilayah kepulauan di Indonesia.<sup>17</sup>

Berbeda dengan negara Turki yang lebih maju dikarenakan adanya pengembangan ekonomi di Eropa dan pasar dunia yang dinilai semakin besar dengan prospek yang semakin bagus. Kepentingan Indonesia dan Turki sudah memasuki tahap optimalisasi yang lebih baik. Memanfaatkan sepenuhnya nilai-nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia seringkali dipandang sebagai salah satu elemen pendukung negara yang sebagai wahana pelaksanaan politik luar negerinya.<sup>18</sup>

Pada kerjasama di bidang politik antara Indonesia dan Turki dapat mencakup berbagai aspek dan dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi dan inisiatif, seperti:

1. Diplomasi : Indonesia dan Turki dapat bekerja sama dalam menjalin hubungan diplomatik yang erat. Kedua negara dapat saling mengirimkan duta besar atau perwakilan diplomatik untuk memperkuat hubungan bilateral nya, yang dimana hal itu dapat memperdalam pemahaman kedua negara tentang kebijakan politik masing-masing negara.
2. Forum Internasional : Indonesia dan Turki dapat saling mendukung di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), atau Organisasi Konferensi Islam (OKI). Melalui kerjasama ini, diharapkan kedua negara dapat memperkuat posisi mereka dalam berbagai isu politik dan mengadvokasi kepentingan bersama.
3. Pertukaran pengalaman : Indonesia dan Turki dapat bertukar pengalaman dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk sistem politik, demokrasi, dan pengelolaan pemerintahan. Pertukaran ini dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan kedua negara, serta memperkuat kerjasama antara institusi politik mereka.

---

<sup>16</sup> Yayat Hadiyat. (2014). Kesenjangan Digital Di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81-90.

<sup>17</sup> Karim, Lis Lesmini, Sunarta, Suparman & Bus. (2023). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri.

<sup>18</sup> Todaro, Michael & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Semarang: Erlangga.

4. Pertemuan Tingkat Tinggi : Kedua negara dapat mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin mereka, seperti kunjungan resmi Presiden atau Perdana Menteri. Pertemuan ini dapat menjadi platform penting untuk membahas isu-isu politik bilateral dan regional yang relevan, serta untuk memperkuat hubungan secara keseluruhan.

5. Kerjasama Keamanan : Indonesia dan Turki dapat menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Hal ini dapat mencakup pertukaran intelijen, kerjasama dalam penanggulangan terorisme, dan kerjasama dalam pengembangan industri pertahanan. Melalui kerjasama keamanan ini, kedua negara diharapkan dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas dan keamanan *global*.<sup>19</sup>

Perlu diingat bahwa kerjasama politik antara dua negara adalah dinamis dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Prioritas dan isu-isu yang diutamakan dalam kerjasama politik dapat berubah seiring waktu dan perubahan kepentingan nasional dan regional masing-masing negara.<sup>20</sup>

Turki tidak hanya dianggap sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral biasa dengan Indonesia, namun telah dianggap sebagai negara yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Sehingga hubungan yang terjalin semakin baik dan memperjelas posisi Turki bagi Indonesia. Kedekatan yang dijalin oleh kedua negara tersebut tidak dibangun dengan waktu yang singkat namun berlangsung sejak era Kekaisaran Utsmaniyah hingga Turki Modern,<sup>21</sup>

Secara multilateral, berbagai organisasi dan forum internasional baik formal maupun informal telah diikuti oleh Turki dan Indonesia. Namun yang paling aktif diikuti oleh kedua negara adalah organisasi dan forum yang *concern* di bidang ekonomi dan pembangunan, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), G-20, D-8, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).<sup>22</sup>

Indonesia perlu mendorong pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi maka dari itu terlibatlah Indonesia di dalam WTO. Untuk memperkuat posisi tawar secara ekonomi, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi yang kurang lebih memiliki kesamaan tujuan ekonomi, seperti G-20 di mana Turki juga menjadi anggota kelompok tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Dewi Suratiningsih & Suci Lukitowati. (2020). *Strategi Komunikasi Dalam Diplomasi Kemanusiaan: Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.

<sup>20</sup> Agus Suryono. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

<sup>21</sup> Khariza Pramesthi & Rinta. (2018). *Respon Turki Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Tiongkok Pada Muslim Uighur Tahun 2018*.

<sup>22</sup> Boeike Adam Noor. (2019) *Alasan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020*. (Skripsi. FISIP UIN Jakarta).

<sup>23</sup> Yulius Hermawan. (2011). *Proyek Riset G-20: Peran Indonesia Dalam G-20*. Jakarta: Firedrich Ebert Stiftung.

Negara-negara anggota G-20 terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar ditambah dengan Uni Eropa. Kesembilan belas negara tersebut ialah Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Tiongkok, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki. Kini G-20 tidak hanya mengeluarkan kebijakan finansial seperti moneter dan fiskal, namun juga termasuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Sehingga, terjadi koordinasi serta pertukaran pandangan antar pemerintah. Demi memulihkan sistem perekonomian dunia dan menjaganya tetap kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Maka Indonesia pun memiliki tujuan untuk mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara-negara anggota G-20.<sup>24</sup>

Keterlibatan Turki dalam G-20 dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan aksinya yang mengedepankan diplomasi di bidang ekonomi. Turki pun meyakini perwakilan tinggi negara-negara maju dan berkembang dapat membentuk kekuatan yang besar dengan cara mendefinisikan G-20 sebagai platform yang paling tepat untuk melakukan kerja sama dan koordinasi ekonomi global.<sup>25</sup>

Keanggotaan Turki dalam G-20 menandakan bahwa negara ini sudah menjadi salah satu negara penting di dunia. Dengan demikian, Turki dapat melancarkan negosiasi untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Turki dapat menempatkan diri sebagai anggota yang memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Uni Eropa dan berkontribusi besar dalam sistem perekonomian regional. Salah satu strateginya adalah dengan mengundang perusahaan negara-negara Uni Eropa untuk beroperasi di Turki dengan upah pekerja Turki yang lebih murah.<sup>26</sup>

Kondisi yang berada pada sebuah platform ekonomi internasional yang didalamnya terdapat negara-negara maju, membuat negara berkembang seperti Indonesia dan Turki harus bergandengan untuk memperkuat barisan demi menyeimbangkan hegemoni barat. Jika kerja sama merupakan dampak dari keanggotaan Turki yang berada dalam G-20 bersama Indonesia, maka secara otomatis hubungan Turki dan Indonesia dalam forum multilateral seperti G-20 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Jacques, M. (2011). *When China Rules The World (Ketika China Menguasai Dunia): Kebangkitan Dunia Timur Dan Akhir Dunia Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>25</sup> Kementerian Luar Negeri. (2022). Turki Tegaskan Dukungan Kuat Bagi Presidensi G-20 di Indonesia. [Turki Tegaskan Dukungan Kuat Bagi Presidensi G20 Indonesia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id). Diakses 13 Juni 2023.

<sup>26</sup> Kementerian Keuangan (2022). Apa Itu G-20 dan Manfaatnya Untuk Indonesia. <https://www.djkn.kemtankeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>. Diakses 13 Juni 2023.

<sup>27</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2015). *G-20 Sherpa Meeting : Indonesia Tekankan Perlunya Kemitraan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang Untuk Mendorong*



Organisasi maupun forum internasional yang bersifat formal, hal itu membuat Indonesia dan Turki juga bergabung dalam kerja sama inovatif non-formal yang beranggotakan lima negara yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA). Kemitraan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri di beberapa negara dan forum ini dibentuk pada tahun 2013 di sela-sela Majelis Umum PBB di New York yang bertujuan untuk mendukung tata kelola global yang efektif. Turki dengan sekulerismenya tidak mengganggu perannya dalam OKI. Karena letaknya yang dekat dan budaya yang erat dengan Eropa namun populasinya didominasi oleh penduduk muslim, hal tersebut yang membuat Turki juga dekat dengan negara anggota OKI lainnya.<sup>28</sup>

Bekerja sama dengan Turki di bidang industri pertahanan tidak akan membahayakan posisi Indonesia dalam politik internasional, terlebih lagi prinsip bebas-aktif menjadi prinsip yang dianut oleh Indonesia. Sehingga memudahkan Indonesia untuk bergerak dalam kerjasama dengan negara manapun. Keputusan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara pun didahului oleh masukan-masukan dari kementerian atau lembaga teknis terkait, misalnya Kemhan dan KKIP di bidang pertahanan.<sup>29</sup>

Produksi alutsista secara mandiri juga memberikan manfaat ekonomi lainnya juga, alih-alih mengirim dana APBN ke luar negeri untuk impor senjata, Indonesia dapat menggunakan industri pertahanan untuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan, hingga melindungi nilai mata uang. Sehingga dengan mengekspor alutsista, industri pertahanan menjadi sumber potensial pendapatan dengan mata uang internasional.<sup>30</sup>

Hubungan antara Turki dengan Indonesia, baik secara bilateral maupun dalam berbagai forum dan organisasi internasional, membuahkan dampak positif bagi Indonesia, seperti meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam berbagai proses perundingan dan konferensi. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang dicapai oleh Indonesia berkat hubungan kerja sama yang dijalin oleh kedua negara.<sup>31</sup>

---

*Pembangunan.* [G20 Sherpa Meeting: Indonesia Tekankan Perlunya Kemitraan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang Untuk Mendorong Pembangunan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#). Diakses pada 13 Juni 2023

<sup>28</sup> Sekretaris Kabinet. (2023). *Mikta Sebagai Kekuatan Penyeimbang Dalam Penyelesaian Isu Global*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | MIKTA Sebagai Kekuatan Penyeimbang dalam Penyelesaian Isu Global ([setkab.go.id](#)). Diakses pada 13 Juni 2023.

<sup>29</sup> Kementerian Pertahanan. (2018). *Indonesia-Turki Komitmen Perkuat Hubungan Bilateral*. [Komitmen Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Turki \(kemlu.go.id\)](#). Diakses pada 14 Juni 2023.

<sup>30</sup> Danang Widoyoko & Pontoh. (2003). *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*. Indonesia Corruption Watch (ICW): National Democratic Institute (NDI).

<sup>31</sup> Riza Sihbudi. (1997). *Indonesia Timur Tengah: Masalah Dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani.

Dengan meningkatnya posisi dalam sistem, Indonesia tidak lagi sekedar menerima keputusan yang ditentukan oleh negara-negara *hegemon*, namun juga dapat menggerakkan negara-negara berkembang lainnya untuk dapat naik kelas dengan menguasai teknologi militer. Hal ini patut dipandang sebagai salah satu faktor Indonesia dalam memilih Turki sebagai mitra kerja sama di bidang industri pertahanan.<sup>32</sup>

Selain itu, dengan semakin seringnya Indonesia dan Turki berinteraksi dalam berbagai forum dan organisasi internasional, kedua negara semakin memahami kondisi satu sama lain, keakraban kedua negara yang terjalin dalam berbagai forum dan organisasi internasional akan dapat saling memahami. Semakin sering bertemu dan bergabung dalam organisasi atau forum internasional yang sama, maka ikatan antara kedua negara semakin terjalin erat. Sehingga memungkinkan terjadinya agenda-agenda kerja sama di bidang lain selain di sektor ekonomi dan politik, seperti kerja sama industri pertahanan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia dan Turki.<sup>33</sup>

Persetujuan kerja sama di bidang industri pertahanan yang ditandatangani di Ankara tahun 2010 lalu sudah menjadi undang-undang kerjasama industri pertahanan Turki-Indonesia. Dalam prosesnya untuk menjadi sebuah undang-undang, yang dimana sebuah perjanjian internasional harus melewati proses perundingan di DPR. Sebagai representasi rakyat Indonesia, DPR akan melaksanakan serangkaian proses perundingan serta perdebatan-perdebatan di dalam sidang dan diakhiri oleh sidang paripurna. Sehingga hasil rapat tersebut disahkan menjadi sebuah undang-undang yang akan diratifikasi oleh Presiden.<sup>34</sup>

Tanggung jawab untuk merancang Undang-Undang Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan yang dilakukan oleh Komisi I DPR. Rancangan Undang-Undang yang mengatur teknis kerja sama dengan Turki di sektor industri persenjataan tersebut kini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Zuhri, Fajriah, Wibowo, Prakoso, Indriani, Windari & Yogya. (2020). *Teori Komunikasi Massa Dan Perubahan Masyarakat* (Vol. 5). Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligensia Media. Malang: Intrans Publishing Group.

<sup>33</sup> Dewi Suratiningih & Suci Lukitowati. (2020). *Strategi Komunikasi Dalam Diplomasi Kemanusiaan: Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

<sup>34</sup> Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki*. [UU No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki \(Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey\) \[JDIH BPK RI\]](#). Diakses pada 15 Juni 2023.

<sup>35</sup> Kementerian Pertahanan. (2018). *Menhan Dan Komisi I DPR RI Setujui RUU Kerja Sama Pertahanan RI – Korea*. <https://www.google.com.komisi-i-dpr-ri-menyetujui-disahkannya-ruu-pengesahan-kerjasama->

Komisi I DPR membuat peraturan perundang-undangan dengan cara proses yang lumayan panjang, termasuk di dalamnya berupa perbedaan pendapat pro dan kontra atas kerja sama industri pertahanan dengan Turki. Namun pihak Komisi I DPR tidak mau mengungkapkan dari fraksi mana saja yang setuju maupun tidak setuju di dalam rapat pembahasan. Dalam perdebatan yang terjadi adalah hal yang biasa dan tidak boleh dipandang sebagai kepentingan fraksional, namun harus dilihat sebagai kepentingan rakyat.<sup>36</sup>

Hingga saat ini, baik dari pihak Kementerian Luar Negeri maupun Komisi I DPR, tidak akan terjadi penolakan terhadap dibentuknya persetujuan kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam menjadi sebuah Undang-Undang, atas kerjasama yang terjalin antara Turki dengan Indonesia dalam pengembangan *modern medium weight tank*.<sup>37</sup>

Dalam segi teknis nya kemajuan industri pertahanan saat ini dapat ditopang oleh kemampuan korporasi dalam menguasai teknologi pembuatan senjata. Mekanisme *joint development* MMWT yang didalamnya seperti transfer teknologi pertahanan akan dapat mempermudah industri domestik Indonesia dalam mempelajari dan menguasai teknologi pertahanan terbaru yang dimana sebelumnya tidak dapat dimiliki.<sup>38</sup>

Selain itu, kerja sama pengembangan tank kelas *medium* saat ini turut merangsang produktivitas industri yang terjadi di bagian hulu nya, seperti industri baja. Dalam memproduksi sistem persenjataan dipandang sebagai penggerak yang memacu pertumbuhan industri baru dan teknologi baru, seperti pemutakhiran dan inovasi teknologi tank, sistem elektronik, dan sistem informasi.<sup>39</sup>

Secara teknis, Turki memiliki keunggulan di bidang pertahanan dibandingkan dengan Indonesia. Keunggulan yang dimiliki Turki tidak hanya berujung pada alpalhankamnya, namun juga didukung oleh kemandirian negara Turki dalam memproduksi sendiri berbagai unit senjata yang digunakannya, mulai dari platform darat, laut, hingga udara.<sup>40</sup>

---

[pertahanan-ri-ukraina.html&usg=AOvVaw2QBYSQDV\\_NarNY-Do\\_OcHa&opi=89978449](#). Diakses pada 15 Juni 2023.

<sup>36</sup> Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *Komisi I : Alat Kelengkapan Dewan*. [Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](#). Diakses pada 15 Juni 2023.

<sup>37</sup> Agus Subagyo. (2018). *Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3), 1-20.

<sup>38</sup> Aditya Eka Sasmita. (2022). Implications Of Manufacturing Kaplan Medium Tanks As Reflection Of Indonesia's Defense Industry Independence Towards Indonesia's Position In Southeast Asia Region. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 4364-4373.

<sup>39</sup> Rodon Pedrason. (2021). *Belt And Road Initiative Peluang Dan Tantangan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

<sup>40</sup> Kementerian Luar Negeri. (2022). Peluang dan Tantangan Peningkatan Kerja Sama Turki. [Tahun 2023 Peluang Dan Tantangan Peningkatan Kerja Sama Turki Indonesia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia \(kemlu.go.id\)](#). Diakses pada 15 Juni 2023.

Dalam kerjasama yang dilakukan dengan Turki, hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memperkuat postur pertahanan serta kemandirian industri militernya. Kebutuhan Indonesia seperti berbagai jenis alutsista bukan hanya kebutuhan domestik, namun juga dalam rangka alih teknologi menuju kemandirian alutsista. Atas hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kemhan dan KKIP memutuskan bahwa Turki memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan mitra kerja sama dalam pengadaan alutsista dan didukung dengan latar belakang Turki yang sudah unggul di sektor industri pertahanannya.<sup>41</sup>

Ketika dalam proses pengembangan tank, teknisi yang diberangkatkan dari Indonesia dapat sebuah misi untuk menerima pengetahuan teknologi apapun yang menyangkut dengan tank. Para delegasi teknisi Pindad pergi ke pusat pengembangan dan produksi FNSS, hal tersebut guna untuk mempelajari dan menguasai desain tank.<sup>42</sup>



**Gambar 4. PT. Pindad (Persero)- Kolaborasi Antara PT. Pindad dengan FNSS**

Sumber : (PT. Pindad, 2021).<sup>43</sup>

Teknisi yang dari Indonesia akan mempelajari cara pembuatan dan pengembangan tank dengan teknologi *tracked propulsion system* yang akan memenuhi standar NATO. Peluang tersebut tidak akan disia-siakan oleh delegasi PT. Pindad untuk dapat menerima transfer teknologi yang dialihkan dari FNSS. Dalam *division of labour*, para teknisi saling membagi tugas dengan keahliannya masing-masing untuk menciptakan produk yang terbaik secara efisien, begitu pula yang terjadi dalam pengembangan MMWT ini. Para teknisi dari Indonesia

---

<sup>41</sup> Kementerian Pertahanan. (2015). Penandatanganan Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki. <https://www.google.com.kemhan.go.id%2F2015%2F08%2F16%2Fpenandatanganan-kerjasama-industri-pertahanan-indonesia-turki.html>. Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>42</sup> PT. Pindad. (2018). Firing Test Medium Tank Pindad. [PT. Pindad \(Persero\) - Firing Test Medium Tank Pindad](#). Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>43</sup> [PT. Pindad \(Persero\) - KOLABORASI ANTARA PT PINDAD \(PERSERO\) DENGAN FNSS](#). Diakses pada 11 Juni 2023.

menonton dan belajar, senjata utama yang terpasang di *medium tank* adalah hasil dari keahlian yang dimiliki para teknisi dari Indonesia. PT. Pindad yang telah memiliki lisensi Meriam 105mm dari CMI Defense Belgia biasanya menempatkan meriam tersebut di tank seperti AMX Scorpion, kini meriam tersebut ditempatkan sebagai senjata utama *medium tank* yang sekarang disebut Harimau.<sup>44</sup>

Atas dasar faktor-faktor teknis tersebut, serta tidak melupakan unsur ekonomi-politis di dalamnya, maka pemerintah Indonesia berusaha menggandeng Turki dalam proyek pengembangan tank dengan bobot medium antara 30-35 ton. Kerja sama diawali oleh persetujuan kerja sama industri pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan saat itu yaitu, Purnomo Yusgiantoro saat kunjungan kenegaraan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ibu kota Turki yaitu Ankara. Selanjutnya, Indonesia dan Turki mulai bekerjasama dari pengadaan alutsista, pengembangan bersama, produksi bersama, hingga pemasaran bersama hasil produksinya.<sup>45</sup>

Kebutuhan TNI AD atas tank yang berbobot sedang yang sesuai dengan kontur geografis Indonesia, selain itu kebetulan Turki juga sedang menggarap pengembangan tank sehingga menawarkan kerja sama atas dasar kerja sama industri pertahanan, bukan kerja sama pertahanan secara umum. Hal hasil Turki dianggap memiliki keahlian yang lebih baik dalam kasus pembuatan tank. Sehingga, pemerintah Indonesia, melalui UU Industri Pertahanan, berusaha mengakuisisi teknologi-teknologi pembuatan tank yang sudah dimiliki oleh Turki dalam kerja sama industri pertahanan. Transfer teknologi menjadi isu penting yang menentukan keberhasilan kerja sama antara kedua negara berpenduduk mayoritas muslim ini. Dan diharapkan kepada Indonesia di kemudian hari tidak hanya bisa merawat tank yang sudah ada namun juga dapat memproduksi tank secara dengan teknologi industri pertahanan yang telah dikuasainya.<sup>46</sup>

Kemampuan Indonesia akan semakin diperhitungkan di dunia internasional sebagai negara produsen alutsista canggih yang setara dengan Turki. Hal ini terjadi karena transfer teknologi oleh Turki yang menduduki posisi 2a dalam sistem industri pertahanan dapat meningkatkan kelas Indonesia yang masih berada di tingkat 2b, mengejar kemajuan

---

<sup>44</sup> PT. Pindad. (2014). Pindad Bangun Sistem Senjata Kendaraan Tempur Dengan CMII Defence. [PT. Pindad \(Persero\) - PINDAD BANGUN SISTEM SENJATA KENDARAAN TEMPUR DENGAN CMI DEFENCE](#). Di akses pada 11 Juni 2023.

<sup>45</sup> Febby Triantama. (2020). Kerjasama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau Sebagai Perwujudan Ketahanan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 273-392.

<sup>46</sup> Kementerian Pertahanan. (2018). Uji Daya Gerak Medium Tank Hasil Pengembangan Bersama Antara PT. Pindad Dan FNSS Turki 11 Agustus 2018. [PT. Pindad \(Persero\) - Pindad Uji Daya Gerak Medium Tank](#). Diakses pada 16 Juni 2023.

perkembangan industri militer Korea Selatan yang juga sama-sama mengembangkan jenis *medium tank*.<sup>47</sup>

Apabila mitra kerja sama industri pertahanan saat ini berada di tangan industri militer Jerman, tidak dapat dipungkiri lagi yang terjadi hanyalah eksploitasi ekonomi Indonesia atas teknologi alutsista Jerman yang telah usang, ditambah tawaran blueprint sasis Marder 1A3 bekas pakai AD Jerman besutan tahun 1960 untuk diterjunkan era Perang Dingin itu menjadi “gimik” belaka bagi industri pertahanan Indonesia yang menduduki posisi 2b. Teknologi militer Turki yang diakui oleh NATO juga digunakan bahkan dapat diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia. Hal ini sejalan dengan perubahan yang ditekankan oleh Wallerstein, arah pembangunan yang bersifat fleksibel dengan adanya peluang perpindahan status suatu negara dalam *World-System*, caranya adalah menjadikan negara yang masuk dalam kategori rendah menjadi lebih mandiri, seperti menguasai teknologi industri pertahanan.<sup>48</sup>

Dengan demikian, Indonesia tidak khawatir lagi dengan tekanan embargo dari negara berteknologi militer maju yang berperan sebagai penyuplai alutsista berupa kendaraan tempur darat. Terlebih mendapatkan perlakuan eksploitatif dari negara-negara maju dalam sistem industri pertahanan dunia, seperti mendapatkan hibah alutsista bekas dengan perjanjian, membeli dengan harga murah alutsista tua yang berproteksi rendah, bahkan berusaha menjual sistem persenjataan baru. Padahal *platform* yang diusung merupakan alutsista uzur dan tidak lagi diproduksi di negaranya, semua hal tersebut jelas akan berdampak pada kekuatan pertahanan militer Indonesia secara menyeluruh. Sehingga, bisa dikatakan bahwa reposisi ini bisa terjadi akibar dari adanya penawaran yang buruk dari Jerman sebagai negara maju.<sup>49</sup>

## 4.2 Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan

Pergaulan internasional setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Sering ditemukan, kepentingan nasional suatu negara beririsan dan bahkan berbenturan dengan kepentingan negara lain. Hal seperti ini rentan mengantarkan negara

---

<sup>47</sup> Kementerian Perindustrian. (2022). *Punya Teknologi Canggih, Industri Alat Pertahanan Bidik Pasar Ekspor*. [Kemenperin: Punya Teknologi Canggih, Industri Alat Pertahanan Bidik Pasar Ekspor](#). Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>48</sup> Mario Ade Sosiawan. (2019). *Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Dalam Pengadaan Senjata*. (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan).

<sup>49</sup> Poltak Partogi Nainggolan. (2018). *Indonesia Dan Rivalitas China, Jepang, Dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

tersebut dalam ketegangan dan terkadang berujung konflik. Maka dari itu negara menggunakan cara kerjasama untuk mengamankan atau meraih kepentingan nasionalnya.<sup>50</sup>

Bahwa bisa diartikan kerjasama merupakan suatu keahlian dalam menentukan cara memenangkan kepentingan kita tanpa harus menimbulkan permusuhan. Dikaitkan dengan pertahanan, maka kerjasama pertahanan bisa bermakna sebagai suatu cara memenangkan kepentingan bangsa dengan menggunakan militer sebagai alat atau sumber daya tanpa harus mengedepankan kekerasan sebagai jalannya. Kerjasama pertahanan juga bisa dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang utamanya dilakukan oleh perwakilan departemen pertahanan lainnya dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan nasional di bidang keamanan dan pertahanan, hal tersebut juga sebagai langkah yang ditempuh dengan cara negosiasi dan instrumen kerjasama lainnya.<sup>51</sup>

Penggunaan militer dalam urusan kerjasama negara tidak lagi murni, karena dianggap sebagai penggunaan kekerasan, contohnya seperti ketika banyak negara telah mentransformasi peran militernya menjadi salah satu alat kerjasama untuk pencapaian tujuan dengan tidak melibatkan unsur kekerasan ataupun ancaman di dalamnya. Banyak negara telah mencontohkan bagaimana militer telah menjadi salah satu paket kerjasama yang penggunaannya tidak hanya terbatas pada urusan pertahanan keamanan saja.<sup>52</sup>

Keterlibatan TNI dalam kerjasama antar negara dilakukan dengan berbagai peran dalam menjaga perdamaian dunia, TNI telah menjadi salah satu partisipan tetap pada misi pasukan perdamaian PBB. Di wilayah ASEAN, TNI juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan militer negara sahabat seperti melalui forum-forum pertemuan, salah satunya adalah *ASEAN Defense Ministerial Meeting* yang merupakan forum yang bertujuan untuk membangun persepsi yang sama dengan angkatan bersenjata negara-negara ASEAN dan mitranya mengenai keamanan *regional*, dalam meningkatkan saling percaya dan mengidentifikasi bidang-bidang baru untuk kerja sama. Indonesia juga bahkan pernah menjadi inisiator pertemuan Jakarta *International Defence Dialog* (JIDD), yang merupakan suatu forum komunikasi internasional dalam membahas bidang keamanan dunia. Hal ini merupakan salah satu aspek kerjasama pertahanan yaitu membangun saling percaya.<sup>53</sup>

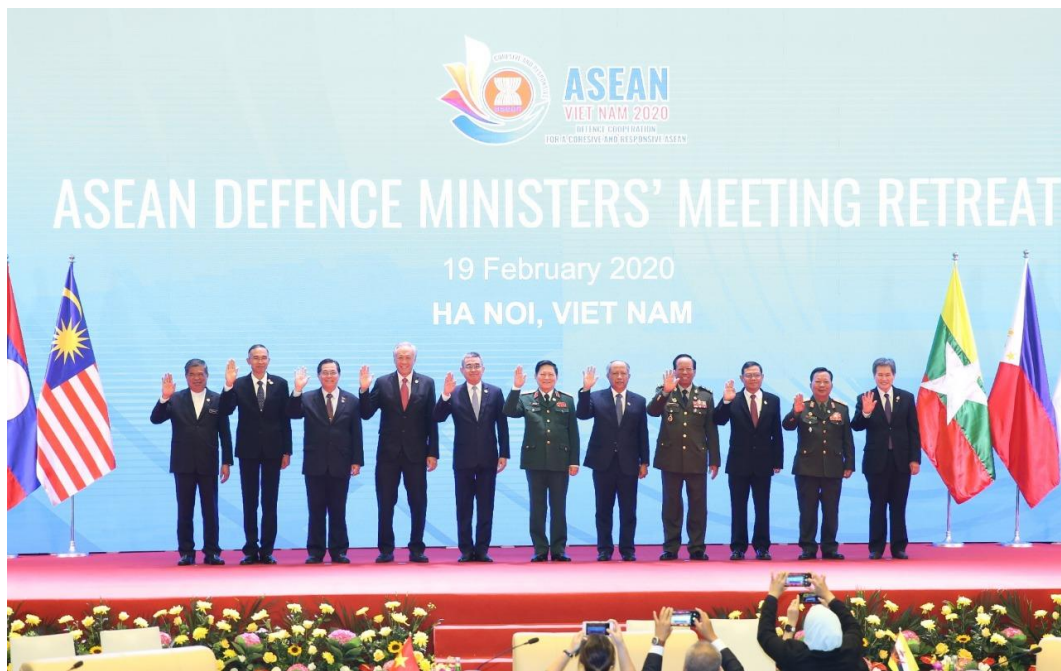
---

<sup>50</sup> Sekretaris Kabinet. (2018). Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia \(setkab.go.id\)](https://setkab.go.id). Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>51</sup> Ian Montratama, S. E., MEB, M. S., & Begi Herstanti, S. H. (2021). *Troika-Kerja Sama Pertahanan India, Indonesia, dan Australia: Peluang dan Tantangannya Bagi Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

<sup>52</sup> Endang Turmudi & Riza Sihbudi. (2005). *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>53</sup> Dyah Ayu Putri Zahra, Gunawan Santoso, Adinda Putri Darmanto & Reni Oktafiani. (2023). Generasi Z dalam Perdamaian Dunia untuk Kemanusiaan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 227-245.



**Gambar 5. The ASEAN Defence Ministers Meeting Retreat was officially in Hanoi on 19 February 2020**

Sumber : (Kementerian Luar Negeri, 2020)<sup>54</sup>

Dari gambaran penjelasan peran TNI tersebut, keterlibatan TNI dalam kerjasama negara masih terbatas pada kerjasama yang terkait langsung dengan kepentingan negara di bidang pertahanan maupun keamanan. Pelibatan TNI dalam kerjasama yang dilakukan guna untuk memperjuangkan kepentingan negara di bidang lain khususnya ekonomi dan politik yang masih belum signifikan.<sup>55</sup>

Dikarenakan belum maksimalnya keterlibatan militer dalam kerjasama yang dilakukan dengan beberapa negara lainnya, tentu saja memiliki penyebab dan latar belakang. Ada beberapa kemungkinan belum maksimalnya TNI dalam kerjasama guna untuk memperjuangkan kepentingan di luar urusan pertahanan dan keamanan yaitu:<sup>56</sup>

1. Hubungan antara kelembagaan belum sinergi khususnya dengan kementerian Luar Negeri.

<sup>54</sup> [Retret Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN \(ADMM Retreat\) Resmi dibuka di Hanoi \(19/02/2020\) \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id). Diakses pada 1 Juli 2023.

<sup>55</sup> Hediarto, Armawi & Martono. (2016). Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kodim 0613/Ciamis, Jawa Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 321-333.

<sup>56</sup> Diandra Megaputri Mengko. (2015). Problematika Tugas Perbantuan TNI. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 175-196.



2. Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki TNI masih terbatas dikaitkan pada pelibatangannya dalam kerjasama dengan negara lain.

Ada beberapa kondisi yang harus dimiliki oleh TNI dalam rangka menjadikannya sebagai pilihan utama negara dalam melakukan kerjasama, misalnya TNI harus memiliki harga tawar yang baik di wilayah Asia, selain itu, koneksi hubungan dengan militer negara lain tentu juga mempengaruhi cara pandang dan perilaku negara lain terhadap TNI. Dengan demikian, TNI harus lebih jeli dalam menentukan prioritas kepentingan nasional yang bisa diperjuangkan melalui kerjasama, salah satunya berkoordinasi dengan kementerian Luar Negeri terkait negara mana saja yang menjadi target kerjasamanya.<sup>57</sup>

Penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa TNI cukup aktif terlibat dalam kegiatan kerjasama antar negara. Namun demikian, peran TNI dalam kerjasama antar negara dirasa belum maksimal dan masih dapat dioptimalkan lagi. Padahal, dari segi militer dapat memainkan peranan penting dalam kerjasama untuk menunjang kerjasama dengan negara lain. Keterlibatan militer dalam kerjasama antar negara dapat mempermudah suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>58</sup>

Peran yang diambil pada kerjasama pertahanan ini, hanya akan memfokuskan pada kerjasama pertahanan melalui pengiriman pasukan perdamaian dan penempatan atase pertahanan. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu yang menjadi sorotan adalah belum adanya penyusunan strategi kerjasama pertahanan secara utuh dan menyeluruh yang bisa melibatkan seluruh *stakeholders*. Hal tersebut sangat jelas tergambar dalam pelaksanaan tugas atase pertahanan, serta belum optimalnya pemanfaatan kerjasama pertahanan untuk kepentingan di luar isu pertahanan dan keamanan yang dimana hal tersebut dapat dilihat dalam kerjasama pertahanan melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB.<sup>59</sup>

Pengiriman pasukan TNI tersebut dalam misi perdamaian merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh TNI. Salah satu tujuan kerjasama pertahanan yaitu untuk mencegah terjadinya konflik dan mempengaruhi kebijakan negara yang dituju atau setidaknya menciptakan persepsi positif terhadap militer. Ada dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam operasi perdamaian PBB, yaitu negara yang menjadi anggota PBB dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan dana

---

<sup>57</sup> I Gede Wahyu Wicaksana. (2020). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik Dan Tatanan Kawasan*. Surabaya: Airlangga University Press.

<sup>58</sup> Arisaputra. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 28(2), 188-216.

<sup>59</sup> Yon Machmudi. (2021). *Timur Tengah Dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia*. Bekasi: Bumi Aksara.

untuk mendukung operasi perdamaian tersebut dan kedua, dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian langsung ke daerah konflik.<sup>60</sup>

Keterlibatan TNI dalam misi perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957 ketika untuk pertama kalinya TNI mengirimkan pasukan perdamaian berjumlah 559 personel yang tergabung dalam pasukan PBB *United Nation Emergency Force* (UNEF) dalam rangka ikut meredakan konflik antara Mesir dengan Inggris. Misi pertama pasukan perdamaian TNI dianggap berhasil oleh PBB dan sejak saat itu TNI terus mendapatkan kepercayaan dari PBB untuk membantu perdamaian di berbagai belahan dunia. Misi kedua UNOC di Kongo tahun 1960 yang berjumlah 1.074 personel, selanjutnya misi-misi yang diikuti oleh Kontingen Garuda diterjunkan untuk menjaga perdamaian di berbagai negara antara lain UNEF di Mesir (1973-1979), UNIMOG di Irak (1988,1989,1990), UNTAC di Kamboja (1992), UNIKOM di Kuwait (1993), UNPROFOR di Bosnia (1995), UNPREDEP di Macedonia (1996), UNTAES di Slovenia Timur (1997), UNAMSIL di Siera Leone (2002), MONUC di Kongo (2004), dan sejak 2006 sampai saat ini Indonesia mengirimkan misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ke Lebanon, kizi ke Kongo dan Haiti serta Unamid (United Nations Mission In Darfur) ke Darfur-Sudan, serta Mali tahun 2015.<sup>61</sup>



**Gambar 6. Jokowi Melepas Kontingen Garuda ke Kongo dan Lebanon**

Sumber : (CNN Indonesia, 2018).<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Christian Gordon Rambu. (2016). Penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara ASEAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), 213-228.

<sup>61</sup> Kementerian Luar Negeri. (2019). Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. [Indonesia Dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Pbb | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id). Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>62</sup> [Jokowi Melepas Kontingen Garuda ke Kongo dan Lebanon \(cnnindonesia.com\)](https://cnnindonesia.com). Diakses pada 16 Juni 2023.

Sejauh ini, pelaksanaan tugas perdamaian TNI di bawah bendera PBB dianggap cukup berhasil terutama dalam melakukan komunikasi dan pembinaan warga di daerah konflik. Penerapan yang dilakukan pada metode pembinaan teritori dalam pelaksanaan tugas perdamaian cukup membuahkan hasil yang sangat positif dalam pencapaian tugasnya. Salah satu daerah tugas pasukan TNI secara regular ditempatkan adalah di Lebanon. Kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal di Lebanon Selatan dimanfaatkan dengan baik oleh TNI. Interaksi yang dilakukan oleh TNI dengan masyarakat di Lebanon Selatan menghasilkan sebuah penerimaan yang sangat baik terhadap keberadaan pasukan TNI di wilayah tersebut. Upaya untuk mendapatkan penerimaan serta pengelolaan terhadap interaksi tersebut menjadi sebuah fenomena tersendiri baik dikalangan kontingen UNIFIL maupun masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut terkait dengan sulitnya kontingen UNIFIL dari negara lain untuk dapat diterima secara baik oleh masyarakat di Lebanon Selatan.<sup>63</sup>

Terlepas dari beragam keberhasilan, pelaksanaan tugas pasukan perdamaian Indonesia yang juga merupakan bentuk kerjasama pertahanan dan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kerjasama militer yang dilakukan oleh *peacekeeping* TNI baru sebatas pada isu pertahanan dan keamanan saja, padahal peluang untuk bisa memanfaatkan misi tersebut untuk mencapai kepentingan nasional di bidang lain terutama ekonomi cukup terbuka luas. Beberapa negara *contributor* pada pasukan perdamaian PBB telah mencontohkan dalam pelaksanaan tugasnya, pasukan tersebut juga ikut memasarkan produk dalam negerinya di berbagai tempat bertugas. Hal ini tentu perlu untuk menjadi perhatian bagi TNI untuk bisa lebih berkontribusi aktif dalam mencapai kepentingan nasional melalui peran kerjasama militer yang dimainkannya.<sup>64</sup>

Pada atase pertahanan Republik Indonesia, yang dijalankan perwakilan kerjasama adalah pada lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps kerjasama yang diamanatkan, yaitu duta besar, kuasa usaha dan para atase-atase. Untuk atase sendiri terdiri atas dua bagian yaitu atase pertahanan dan atase teknis. Atase pertahanan dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan ke Kementerian Luar Negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara yang bersangkutan, serta diberi kedudukan sebagai seorang diplomat dalam mewakili negara

---

<sup>63</sup> Arief Fahmi Lubis. (2021). *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Kesiapan Perwira Hukum TNI AD Melaksanakan Tugas Dukungan Hukum)*. Pasuruan: Qlara Media.

<sup>64</sup> Andrea Nymaz Bellatrix Novorossiysky. (2023). *Peran Kontingen Garuda XXVIII-I dan XXVIII-J Maritime Task Force UNIFIL Melalui Kerjasama Militer Dalam Upaya Penurunan Tingkat Ketegangan di Perbatasan Lebanon Selatan Tahun 2016-2018*. (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana).

pada kerjasama. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang militer dan pertahanan dan keamanan kepada Duta Besar untuk berkuasa penuh. Dalam pelaksanaan tugasnya, atase pertahanan belum maksimal dalam mencapai targetnya. Tidak jarang dalam menjalankan tugasnya terjadi *miss* komunikasi antara atase pertahanan dengan duta besar sebagai kepala perwakilan sebuah negara. Terdapat beberapa kasus ketika misi yang diemban oleh atase pertahanan yang belum sinkron dengan misi dari kepala perwakilan, sehingga pelaksanaan tugas kerjasama terkesan berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu antara lain:

- a.) Belum adanya pemahaman yang sama bahwa duta besar merupakan kepala perwakilan yang bertugas sebagai *head of mission* dan mengendalikan pelaksanaan tugas kerjasama di negara akreditasi. Masih ada anggapan bahwa duta besar merupakan perwakilan Kementerian Luar Negeri, padahal duta besar adalah perwakilan dari negara untuk menjalankan tugas kerjasama yang diamanatkan oleh negara.
- b.) Dalam penyusunan *mission paper* baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun TNI belum dilaksanakan secara terkoordinasi. *Mission Paper* merupakan panduan pelaksanaan kerjasama di suatu negara yang berisi prioritas sasaran serta strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan kerjasama. Penyusunan *mission paper* untuk kepala perwakilan masih dilakukan oleh calon duta besar dan belum dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri sehingga *mission paper* tersebut tidak tercapai. Namun, yang lebih disayangkan lagi, Atase Pertahanan RI Sebagian besar tidak memiliki *mission paper* sebagai panduan pelaksanaan tugas kerjasamanya.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaan kerjasama pertahanan, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh militer menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pelaksanaan kerjasama tersebut. Militer yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik cenderung untuk berhasil dalam melaksanakan misi kerjasamanya. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kerjasama yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk merubah atau mempengaruhi kebijakan suatu negara baik dengan cara keras ataupun dengan cara halus, yang dalam pelaksanaannya kerap melakukan tawar menawar atau *bargaining*, sehingga kuatnya posisi tawar menjadi jaminan berhasilnya kerjasama yang dijalankan. Posisi tawar pada instrumen kerjasama dalam hal ini militer sangat bergantung pada kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Andi Widjajanto (2005). Evolusi Intelijen Indonesia. *Intelligence Evolution in Indonesia, , Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis and Center For Global Civil Society Studies, 23-49.

<sup>66</sup> Rendy Adiwilaga. (2018). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia: Teori Dan Prakteknya*. Yogyakarta: Deepublish.

Saat ini, kapasitas yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari harapan untuk dapat mengemban tugas kerjasama militer dengan target dapat mempengaruhi atau merubah kebijakan negara pada TNI belum memiliki saran yang memadai dalam melakukan kerjasama militer seperti kelengkapan persenjataan dan alutsista serta dukungan anggaran yang ideal. Posisi tawar militer sangat bergantung pada kuatnya militer tersebut terutama ditinjau dari segi kelengkapan peralatan perang.<sup>67</sup>

Dari segi kapabilitas atau kemampuan yang mengarah pada tugas kerjasama, secara terbuka diakui bahwa TNI juga belum memiliki kemampuan yang cukup baik dari segi personal maupun dari segi strategi. Untuk dari segi personal, disadari bahwa personal TNI masih belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan pada bidang kerjasama. Keterbatasan bahasa dan wawasan menjadi penghambat dominan dalam melaksanakan tugas kerjasama.<sup>68</sup>

Saat ini TNI memiliki banyak kerja sama dengan militer negara sahabat, baik itu melalui program latihan bersama, pendidikan dan operasi. Dari kerjasama tersebut, tidak sedikit prajurit TNI yang dikirim ke luar negeri untuk melakukan program-program tersebut, namun harus diakui bahwa kontribusi prajurit khususnya terkait dengan kerjasama masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk dari segi strateginya, TNI masih perlu merumuskan kembali suatu strategi yang jitu dan komprehensif dalam kerjasama. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh TNI baik oleh Mabes TNI maupun Mabes Angkatan terus menerus dilaksanakan bahkan sudah menjadi suatu program tetap, tapi pelaksanaannya belum tersusun dalam suatu strategi kerjasama TNI yang utuh. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Angkatan (AD, AU, dan AL) masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa strategi yang jelas sehingga hasilnya kurang dirasakan. Hal itulah yang mendorong Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam mendorong program kerjanya memasukan penguatan kerjasama militer sebagai salah satu target yang ingin dicapai.<sup>69</sup>

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara bahkan Mabes TNI itu sendiri masih terkesan sebagai rutinitas program semata tanpa adanya target capaian tertentu layaknya suatu strategi. Masing-masing Angkatan melakukan kerjasama

---

<sup>67</sup> Kiki Syahnakri. (2008). *Aku Hanya Tentara*. Jakarta: Kompas.

<sup>68</sup> Bagus Mustakim. (2011). *Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat*. Yogyakarta: Samudra Biru.

<sup>69</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah, & Vinata. (2016). Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara. *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(3), 168-187.

belum didasarkan pada suatu strategi tertentu yang menuntut adanya target capaian yang ditentukan sebelumnya.<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaan kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait terutama Kementerian Luar Negeri sebagai *leading sector* kerjasama negara merupakan hal yang tidak bisa dihindari mengingat salah satu fungsi dari Kementerian Luar negeri adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.<sup>71</sup>

Sejauh ini, komunikasi antara TNI dengan Kementerian Luar Negeri terbilang sudah berjalan lancar dan baik. Indikatornya dapat dilihat dari tingkat pelibatan TNI dalam pengambilan keputusan penting terkait kebijakan luar negeri. Beberapa aspek yang dapat dijadikan contoh adalah kerjasama kewilayahan, kerjasama keamanan internasional, kerjasama ekonomi, kerjasama kemanusiaan, kerjasama teknis, dan seterusnya. Pada kerjasama kewilayahan, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi erat dengan TNI, khususnya dalam menghadapi adanya perselisihan terkait garis demarkasi (darat), maupun delimitasi (laut) dengan negara-negara tetangga.<sup>72</sup>

Namun demikian, koordinasi antara TNI dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal penyusunan strategi kerjasama yang belum berjalan dengan baik. Meskipun di lapangan komunikasi antara personal intens terjadi, namun pada tataran kebijakan hal tersebut belum berjalan dengan baik. Dari data yang diperoleh dari beberapa sumber, terlihat bahwa pelibatan TNI dalam kerjasama bersama Kementerian Luar Negeri masih sangat kecil.<sup>73</sup>

Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, kerjasama selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Di dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen, dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrument dalam kerjasama sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Kementerian Pertahanan. (2019). Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan NIR Militer Multidimensional di Era Milenial.

[https://ppid.kemhan.go.id%2Fassets%2Fattachments%2F20180814\\_0bukukomdukpspn2017web.pdf](https://ppid.kemhan.go.id%2Fassets%2Fattachments%2F20180814_0bukukomdukpspn2017web.pdf). Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>71</sup> Kementerian Luar Negeri. (2023). Fungsi Kementerian Luar Negeri. [Fungsi Kementerian Luar Negeri | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id). Diakses pada 16 Juni 2023.

<sup>72</sup> Muhammad Djafar Shodiq (2022). *Hukum Dan Kebijakan Keamanan Nasional Terhadap Terorisme*. Depok: Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia.

<sup>73</sup> Budiman, A., Ardipandanto, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

<sup>74</sup> Anwar, S. (2016). *Melindungi negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peran kerjasama pertahanan TNI dalam misi perdamaian PBB, sudah mengirimkan pasukan perdamaian yang tergabung dalam *peacekeeping mission* PBB yang merupakan wujud komitmen yang kuat dari pemerintah RI terhadap perdamaian dunia sekaligus memberi arti penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan perdamaian dunia, yang dimana TNI sebagai salah satu ujung tombak kekuatan militer yang mewakili Indonesia di bawah kendali PBB telah mencapai banyak keberhasilan sehingga terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk mengemban misi-misi perdamaian. Dalam konteks kerjasama, keberhasilan pasukan TNI dalam misi PBB secara tidak langsung memainkan peran kerjasama militer, juga ikut memainkan peran kerjasama publik. Penerapan metode pembinaan teritorial dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian oleh TNI dalam pelaksanaannya, komunikasi sosial dan interaksi dengan masyarakat menjadi hal yang rutin dilakukan oleh pasukan TNI. Kerjasama publik merupakan salah satu strategi kerjasama yang dimainkan oleh banyak negara dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi dan opini masyarakat negara lain melalui pendekatan-pendekatan psikologis guna mencapai agenda dan tujuan politiknya. Hal ini, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Jarol B. Mainheim, kerjasama publik memiliki arti sebagai usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini publik maupun pemimpin di negara lain dengan maksud untuk mempermudah pencapaian tujuan dari kebijakan luar negerinya.<sup>76</sup>

Penerapan metode pembinaan *territorial* merupakan sarana yang sangat efektif dalam melakukan pendekatan psikologis terhadap masyarakat di daerah tugas. Aplikasi dari metode pembinaan *territorial* yang dilakukan oleh pasukan TNI meliputi beberapa hal antara lain:

- a.) Pemberian bantuan terhadap masyarakat sekitar daerah operasi
- b.) Bantuan ke sekolah-sekolah
- c.) Pemberian bantuan ke Yayasan anak-anak yatim piatu
- d.) Bantuan medis atau pengobatan terhadap warga sekitar daerah operasi
- e.) Serta kunjungan dan acara-acara keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat .<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Supardi, C. (2017). *Keterlibatan Indonesia Dalam Pasukan Operasi Pengawasan-Perdamaian PBB Pada Konflik Israel-Hezbollah di Lebanon 2006-2014* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

<sup>76</sup> Susmoro, H. (2019). *The Spearhead of Sea Power*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

<sup>77</sup> Lisa Sartika. (2022). Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pembinaan Teritorial Non Fisik Di Kampung Sukabumi Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.

Bukanlah hal yang mengherankan apabila penerimaan masyarakat terhadap TNI di setiap tugas perdamaianya sangat baik. Pada kemampuan TNI dalam berinteraksi dengan masyarakat serta kepekaan terhadap lingkungan merupakan modal dasar bagi prajurit TNI dalam mengembangkan kerjasama pertahanan terutama terkait penerapan kerjasama publik.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal seperti:

a.) Peran kerjasama pertahanan TNI yang secara umum dilihat dari dua peran yang dimainkan yaitu sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB, TNI telah berperan aktif dalam mendukung kerjasama khususnya dalam kerjasama publik, hal tersebut dapat membentuk citra positif TNI dan Indonesia di mata masyarakat di daerah operasi. Namun, keberhasilan TNI dalam kerjasama tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan nasional lainnya khususnya kepentingan bangsa di bidang ekonomi. Kerjasama yang dilakukan TNI dalam keterlibatannya sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB baru sebatas upaya untuk mencapai kepentingan nasional di bidang pertahanan.

b.) Kapasitas dan kapabilitas TNI dalam mendukung kerjasama pertahanan TNI masih belum berada pada kondisi yang ideal. Kemampuan alutsista dan peralatan tempur TNI masih belum bisa memberikan efek tangkal yang maksimal guna meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata internasional. Selain itu, kemampuan dukungan anggaran untuk menunjang kerjasama pertahanan masih terbatas sehingga keleluasaan dalam melaksanakan kerjasama menjadi terbatas, hal tersebut mengurangi efektifitas TNI dalam melaksanakan kerjasama.

c.) Hubungan antara Kementerian Luar Negeri dengan TNI dalam hal kerjasama, secara umum masih terjalin dengan baik. Hubungan koordinasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik pada level operasional di lapangan, namun pada level strategis, terutama dalam penyusunan strategi bersama kerjasama yang masih belum berjalan dengan baik. Kemenlu masih belum melibatkan TNI dalam urusan kerjasama pada level strategis meskipun isu kerjasama yang dibahas akan memiliki relevansi dengan TNI.<sup>79</sup>

#### **4.2.1 Alih Teknologi**

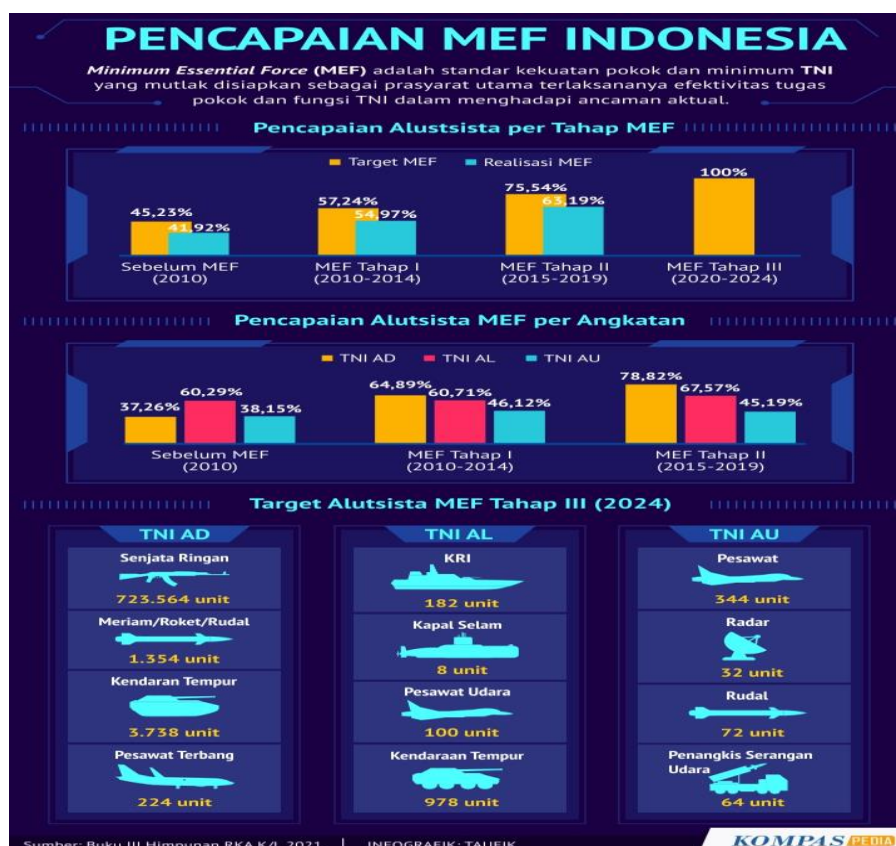
---

<sup>78</sup> Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso & Willy Purna Samadhi. (2018). *Rezim lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>79</sup> Ajjumardi Azra. (2016). *Pasukan Perdamaian TNI Kontingen Garuda Di Libanon*. (Skripsi, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).



Pada bidang pertahanan Indonesia telah banyak melakukan kerja sama dengan negara lain baik itu latihan militer bersama, pengadaan alutsista, modernisasi alutsista maupun *Transfer of Technology* (ToT) atau yang biasa disebut alih teknologi. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) era Presiden Jokowi tahun 2015-2019 khususnya di bidang pertahanan terdapat banyak poin yang membahas mengenai arah kebijakan pembangunan pertahanan diantaranya terpenuhinya alutsista TNI yang ditempuh dengan melanjutkan program *Minimum Essential Force* (MEF), dalam meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan alutsista, meningkatkan kontribusi industri pertahanan dalam pengadaan alutsista, serta bisa meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan.<sup>80</sup>



**Gambar 7. Pencapaian MEF Indonesia.**

Sumber : (Kompas Pedia, 2021).<sup>81</sup>

Kondisi pertahanan Indonesia saat ini cukup meningkat. Sejak ditetapkannya UU mengenai Industri Pertahanan No 16 tahun 2012, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun industri pertahanan yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Peran penting

<sup>80</sup> Jamaan, A., & Karyono, S. (2016). *Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan Belanda dalam Bidang Pertahanan Tahun 2013-2014* (Skripsi, Riau University).

<sup>81</sup> [Pencapaian MEF Indonesia \(kompas.id\)](https://kompas.id). Diakses pada 19 Juni 2023.

yang diamanatkan kepada Ditjen Pothan Kemhan dalam menyiapkan segenap potensi industri yang ada untuk dapat diarahkan dan dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kemampuan pertahanan termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam secara mandiri. Untuk menuju kemandirian dalam industri pertahanan diperlukannya program alih teknologi yang dimana KKIP telah merancang 7 program prioritas industri pertahanan nasional yaitu propelan, roket, rudal, *medium tank*, radar, kapal selam, dan pesawat tempur.<sup>82</sup>

Sesuai dengan program pembuatan *medium tank*, pemerintah melaksanakan kerjasama dengan negara Turki. Yang dimana dalam kerjasama itu PT. Pindad selaku produsen alutsista yang mewakili Indonesia sedangkan dari pihak Turki mempercayakan FNSS *Defence Systems* yang telah memproduksi alutsista berbasis teknologi. Kerjasama ini diawali pada tahun 2010 yang pada saat itu Presiden SBT dan Kementerian Pertahanan melakukan kunjungannya ke Turki. Dalam kunjungan Presiden SBY tersebut kedua negara telah banyak membahas tentang industri pertahanan dan sepakat untuk melakukan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Salah satu kesepakatannya adalah Turki dan Indonesia akan melaksanakan pengembangan *Medium Tank* bersama.<sup>83</sup>

Pada tanggal 4 April 2013 masing-masing negara melakukan rapat koordinasi tentang implementasi kerjasama RI-Turki dalam pengembangan medium tank di PT. Pindad, Bandung. Pada bulan Juli tahun 2013 di Pothan kemhan dilaksanakan presentasi bersama PT. Pindad dan FNSS tentang proposal rencana dan *budget joint medium tank development*. Yang selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2013 pada pameran Bridex di Brunei Darussalam kedua negara melakukan pertemuan yang diantaranya membicarakan pembangunan bersama *medium tank* dan berkomitmen atas program ini.<sup>84</sup>

secara resmi *joint partnership* antara PT. Pindad dan FNSS *Defence Systems* ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2014 di Gedung Soerapto, Kemhan, Jakarta. Untuk *project agreement* atau pelaksanaan proyek ini ditandatangani pada tahun 2015 antara PT. Pindad dan FNSS *Defence Systems* di bawah payung Kementerian Pertahanan kedua negara. Jadi kerjasama ini bisa disebut sebagai *government to government*. Pada kerjasama antara PT. Pindad dan FNSS *Defence Systems* menggunakan investasi senilai 30 juta dollar AS atau

---

<sup>82</sup> Ahmad Budiman, Arjoyati Ardipandanto, Aulia Fitri, & Siti Chaerani Dewanti. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara Di Era New Normal*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

<sup>83</sup> PT. Pindad. (2016). Pindad dan FNSS Luncurkan Desain Medium Tank di Indo Defence 2016. [PT. Pindad \(Persero\) - Pindad dan FNSS Luncurkan Desain Medium Tank di Indo Defence 2016](#). Diakses pada 17 Juni 2023.

<sup>84</sup> Kementerian Pertahanan. (2020). Rapat Kerjasama Industri Pertahanan ke-9 Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id-pothan-rapat-kerjasama-industri-pertahanan-ke-9-republik-indonesia-republik-turki.9>. Diakses pada 17 Juni 2023.

sekitar Rp 400 miliar yang ditanggung oleh Kemenhan kedua negara. Durasi yang dibutuhkan dalam pembuatan tank ini adalah tiga tahun untuk dua *prototype*, yang akan sama-sama dikerjakan para ahli Pindad dan FNSS. Satu *medium tank* dikerjakan di Pindad dan satu lagi dikerjakan di FNSS, hal tersebut sesuai dengan lingkup kerjanya. Kerjasama ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap desain, tahap *prototype*, dan tahap uji coba. Pada tahap desain PT. Pindad mengirimkan beberapa ahli yang mereka miliki untuk mempelajari teknologi yang digunakan oleh FNSS sehingga dapat diterapkan pada rancangan medium tank.<sup>85</sup>

Setelah tahap desain diselesaikan pada 2016, PT. Pindad dan FNSS mengerjakan *prototype medium tank*. Yang dimana pada *prototype* pertama dibuat di Turki dan telah masuk dalam tahap pembuatan hull. Pada awal bulan Desember *prototype* pertama dari Turki tersebut dikirim ke Indonesia. Dalam proses *prototype* tersebut, PT. Pindad telah mengirimkan kurang lebih 20 orang tim *engineering* yang mempelajari tentang proyek medium tank ini. Serta 4 orang dari tim manufaktur untuk mempelajari teknologi di FNSS. Pada tahap uji coba, PT. Pindad yang mendekati momen 73 tahun Indonesia merdeka, PT. Pindad melaksanakan penyambutan *medium tank* karya anak bangsa pada tanggal 16 Agustus 2018 yang telah melalui serangkaian uji sertifikasi dengan Ditlitbangad. Hasil uji coba *medium tank* yang dilakukan sangat memuaskan. Dikarenakan hasil yang dilakukan telah memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang dimiliki oleh TNI AD untuk melengkapi kemampuan dalam kerja teknis dari *medium tank*.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Kementerian Pertahanan. (2017). Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke IDEF dan FNSS Turki Dalam Rangka Program Joint Development Medium Tank. <https://www.google.com/kemhan.go.id-hasil-kunjungan-kerja-ke-idef-dan-fnss-turki-dalam-rangka-program-joint-development-medium-tank-2>. Diakses pada 18 Juni 2023.

<sup>86</sup> Revih Fauzi. (2022). Kepentingan Indonesia Atas Kerja sama Pengadaan Medium Tank Dengan Turki, 2010-2017.



**Gambar 8. FNSS Resmi Perlihatkan Kaplan MT, Prototipe Medium Tank Garapan Bersama PT PINDAD.**

Sumber : (Indomiliter.com, 2017).<sup>87</sup>

Dalam melakukan kerjasama antara PT. Pindad dan FNSS tentu saja memiliki kendala maupun hambatan dari segi anggaran, SDM, keterbatasan alat dan kendala-kendala lainnya. Kendala yang ditemukan tersebut diantaranya :<sup>88</sup>

1.) Dalam kemandirian industri pertahanan yang terdapat pada buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015, dalam lingkup pengadaan teknologi maupun komponen lainnya oleh PT. Pindad, pemerintah menilai PT. Pindad masih memiliki keterbatasan akan hal itu. Saat ini PT. Pindad memiliki beberapa problematika, salah satunya adalah mesin produksi yang belum sepenuhnya mendukung lini produksi dari alat-alat militer baik itu senjata ringan maupun senjata berat, maka dari hal tersebut diperlukan adanya impor dari luar untuk mendukung kinerja PT. Pindad. Oleh karena itu PT. Pindad memiliki kendala tersendiri dalam produksi alutsista secara mandiri.

<sup>87</sup> [FNSS Resmi Perlihatkan Kaplan MT, Prototipe Medium Tank Garapan Bersama PT Pindad \(indomiliter.com\)](https://www.indomiliter.com). Diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>88</sup> Amarilia, I. O., Anu, S., Ainie, R., Inzany, R., & Ranggong, A. M. A. (2023). Kesiapan PT Pindad Dalam Memproduksi Alutsista Guna Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan. *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 58-72.

2.) Persaingan teknologi senjata dalam membangun industri pertahanan negara, bukan hanya Indonesia saja yang memiliki visi dan misi ini. Negara lain pun juga memiliki hal tersebut. Persaingan bukanlah hal yang jarang dalam dunia Internasional. Dalam pembuatan medium tank ini negara China pada saat ini tengah merancang kelas tank yang disebut *Light Weight*, yang dimana sudah jelas dalam hal teknologi tersebut China lebih diunggulkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran oleh PT. Pindad yang saat ini tengah menggarap proyek *medium* bersama FNSS *Defence Systems*. Hal lainnya yang menjadi sorotan bagi PT. Pindad adalah negara tetangga yaitu Malaysia yang pernah melakukan kerjasama dengan FNSS dalam pembuatan AV-8 yang merupakan kendaraan tempur lapis baja *multirole* dengan kemampuan amfibi. Otomatis Malaysia terlebih dahulu mendapatkan *Transfer of Technology* dari FNSS. Dan sekarang tank AV-8 tersebut telah dipasarkan.

3.) Untuk dari segi SDM, para *engineer* PT. Pindad perlu belajar dari *engineer-engineer* yang ada di luar negeri khususnya *engineer* yang ada di FNSS karena terbatasnya kualitas teknologi yang ada. Hal tersebut membuat *engineer* yang dimiliki PT. Pindad kewalahan dalam memproduksi alutsista berbasis teknologi. Terlebih pada saat tim ahli PT. Pindad belajar teknologi di FNSS, hal itulah yang menjadi faktor utama.

4.) Menuju MEF ke III, yang pada akhir tahun 2024, pemerintah menargetkan semua industri pertahanan dalam negeri harus bisa memproduksi alutsista secara mandiri. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi industri pertahanan khususnya PT. Pindad yang menjadi fokus utama. Meskipun kerjasama medium tank ini Indonesia mendapat *Transfer of Technology* tetap saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai teknologinya. Karena pada MEF ke III tersebut ditargetkan alutsista TNI harus 70% buatan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara dari pihak FNSS *Defence Systems* hal utama yang menjadi kendala adalah dalam hal *Transfer of Technology* yang diterapkan kepada PT. Pindad. Dikarenakan bagi FNSS ini merupakan suatu rahasia dan keunggulan perusahaan. Tapi hal itu sudah sesuai dengan UU No 6/12 pasal 48 ayat (5) tercantum tentang aturan yang menyatakan bahwa kerjasama antara industri pertahanan meliputi salah satunya adalah alih teknologi atau *Transfer of Technology*, oleh sebab itu FNSS *Defence Systems* memiliki kewajiban untuk melakukan alih teknologi dalam kebijakan-kebijakan lainnya dalam pembuatan *medium tank* bersama PT. Pindad.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, Aulia Fitri & Siti Chaerani Dewanti. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Hasil dari alih teknologi yang dilakukan PT. Pindad dan FNSS *Defence Systems* dalam program pembuatan medium tank ini, yang sangat mendukung industri pertahanan dalam negeri dalam memproduksi alutsista secara mandiri. Pada kegiatan yang dilakukan antara PT. Pindad dan FNSS *Defence Systems* ini berjalan lancar meskipun ada beberapa kendala di dalam kerjasama ini. Jika dilihat dari berbagai kesepakatan kerjasama yang dijalankan PT. Pindad dan FNSS *Defence Systems* sebagai salah satu industri strategis yang bergerak pada bidang pertahanan dapat memiliki peran yakni menyediakan kebutuhan alutsista yang telah berhasil menghasilkan medium tank yang memiliki keunggulan dari segi spesifikasinya. Dengan ukuran yang lebih kecil dari MBT (*Main Battle Tank*) tank ini sangat cocok berada di medan tropis seperti Indonesia.<sup>90</sup>

Dalam kerjasama ini banyak keuntungan yang didapat oleh Indonesia khususnya PT. Pindad sebagai produsen alutsista Angkatan darat. Hasil yang didapatkan dari kerjasama ini adalah PT. Pindad berhasil mendapatkan teknologi baru melalui *Transfer of Technology* yang didapat dari mitra kerjasama yaitu FNSS *Defence Systems*. Hal tersebut menjawab visi dari UU No 16/12 tentang kemandirian industri pertahanan.<sup>91</sup>

#### **4.2.2 Peningkatan Alutsista**

Dalam keberhasilan PT. Pindad (Persero) dalam peningkatan alutsista pengembangan program *medium tank*, selain mencapai kemandirian industri pertahanan juga diharapkan dapat meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia melalui keunggulan teknologi, selain dapat memberikan keamanan logistik pertahanan bagi Indonesia.<sup>92</sup>

Pada fase pengembangan awal dilakukan peningkatan fungsi dan teknologi pada bagian-bagian *medium tank* sesuai hasil temuan kekurangan dan inovasi yang dijalankan, bahwa PT. Pindad telah melaksanakan proses perubahan atau inovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini dengan tujuan meningkatkan kemampuan medium tank secara bertahap, melalui peningkatan fungsi, manfaat teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Yuliana Nur Anissa & Yusa Djujandi. (2021). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Minimum Essential Force (Mef) Dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (Tni). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 34-55.

<sup>91</sup> Irma Indrayani. (2017). *Pasang Surut Industri Pesawat Terbang Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

<sup>92</sup> Umar Winarno. (2022). Review optimalisasi penggunaan produk industri strategis nasional untuk mendukung kesiapan alutsista TNI AL. *Rekayasa*, 15(1), 100-106.

<sup>93</sup> Harry Sampurno. (2021). *The last chance: kebangkitan industri strategis Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka (Persero), PT.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang dimana dalam pengembangan yang dilakukan oleh PT. Pindad bertujuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Berikut ini adalah bagian-bagian yang telah mengalami peningkatan teknologi pada *medium tank* :<sup>94</sup>

- 1.) Modifikasi sudut hidung lambung dengan desain hidung lambung baru, periskop baru dalam peningkatannya pada posisi, jenis, dan fungsi. Serta *hatch* pengemudi baru, dengan peningkatannya pada ukuran, posisi dan mekanisme sistemnya. Selanjutnya PT. Pindad telah melaksanakan modifikasi pada bagian lambung yang meliputi perubahan bentuk dan posisi, peningkatan jenis, fungsi dan ukuran dengan hasil peningkatan fungsi dan manfaat berupa sudut pandang yang lebih baik, dengan meningkatnya fungsi periskop serta meningkatnya luas ruang pengemudi.
- 2.) Perubahan pada tata letak pedal rem yang dilakukan PT. Pindad telah menjalankan modifikasi pada posisi pedal rem yang sebelah kanan pada sebelah pedal gas.
- 3.) Modifikasi batang kemudi yang dilakukan PT. Pindad karena kerusakan getaran berupa :
  - a) Menambahkan blok karet, ring dan vulkanisasi ke sistem untuk mengurangi getaran pada komponen yang berlaku.
  - b.) Klem baja dengan ulir yang digunakan sebagai pengganti penjelasan langsung batang kemudi.
  - c.) Meningkatkan ukuran utas.
- 4) PT. Pindad melaksanakan peningkatan koneksi longgar sistem pendingin sebagai berikut:
  - a) Panjang total selang dikurangi untuk mengurangi berat dan jarak antara keluar/masuk saluran pendingin udara dan *powerpack* dikurangi untuk mengurangi berat selang.
  - b) Jumlah siku dikurangi untuk menghilangkan titik tekanan tinggi.
  - c) Rute selang pendingin udara pengisian dioptimalkan untuk mengurangi jumlah siku.
  - d) Sambungan elastis sempit & sudut rotasi sempit di wilayah *turbo* yang dimana pada getarannya keras diganti dengan yang jauh lebih halus.

---

<sup>94</sup> Kuncoro Diharjo. (2014). Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship).

- e) Braket pemasangan tambahan yang ditambahkan mengurangi getaran pada selang elastis.
- 5) PT. Pindad telah melaksanakan peningkatan fungsi batang torsi.
- 6) PT. Pindad melaksanakan peningkatan sudut mendaki dengan :
  - a) Meningkatkan tinggi perut belakang.
  - b) Mengurangi perbedaan antara ketinggian belakang dan depan kendaraan.
  - c) Geometri rumah penggerak akhir dilambung dimodifikasi untuk meningkatkan jarak bebas.
- 7) PT. Pindad melaksanakan peningkatan isolasi suara.
- 8) PT. Pindad melaksanakan perbaikan untuk 1 baut yang kendur pada ling track.
- 9) PT. Pindad telah melaksanakan perbaikan pada fungsi klakson.

sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Pindad telah memodifikasi dan perbaikan fungsi pada 9 bagian medium tank yang meliputi perubahan bentuk dan posisi, peningkatan jenis, fungsi dan ukuran serta menghasilkan teknologi yang baru, selanjutnya pada fase pengembangan teknologi. PT. Pindad dalam proses pengembangan berbagai jenis varian baru diantaranya *tank amphibious*, tank angkut personel dan kendaraan pendukung *medium tank*, *unmanned turret* atau senjata khusus tank dengan kaliber 30 mm tanpa awak, berupa *remote control weapon system* yang digunakan untuk perlindungan atau menyerang kendaraan ataupun pertahanan musuh, kendaraan pendukung medium tank serta membangun untuk kepentingan bisnis di bidang komersial.<sup>95</sup>

Berdasarkan data *work breakdown structure* (WBS) 2021 terhadap penguasaan teknologi yang telah dicapai oleh SDM PT. Pindad (Persero) pada sistem medium tank adalah sebagai berikut :<sup>96</sup>

- 1) *Hull* (*sub sistem*)
  - a) Dari 6 bagian komponen *sub-sub* sistem telah dikuasai semua
  - b) Hasil analisis : *hull* telah dikuasai seluruhnya (6 dari 6 item), direncanakan penguasaan mencapai 100%.
- 2) *Weapon* (*sub sistem*)

---

<sup>95</sup> Muhammad Hikam & Yosua Praditya. (2018). Globalisasi Dan Pemetaan Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional: Berdasarkan Analisis Model Element Of National Power:(Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, And Information/Pmesii). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 53-70.

<sup>96</sup> Putri Herdiyana Wulanuari. (2019). Perancangan Sistem Kendali Gun Turret Pada Medium Tank. *Jurnal Teknologi Daya Gerak*, 2(1), 32-53.



a) Dari 5 bagian komponen sub-sub sistem telah dikuasai 2 item dan 3 item tier 2

b) Hasil analisis : *Weapon* telah dikuasai Sebagian (2 dari 5 item), disimpulkan bahwa penguasaan mencapai 40%.

3) *Automotive*

a) Dari 11 bagian komponen *sub-sub* sistem telah dikuasai semua

b) Hasil analisis : *Automotive* telah dikuasai semua (11 dari 11 item), disimpulkan bahwa penguasaan mencapai 100%.

4) *User subsystem*

a) Dari 8 bagian komponen *sub-sub* sistem telah dikuasai 6 item dan 2 item tier 2

b) Hasil analisis : *User subsystem* telah dikuasai Sebagian (6 dari 8 item), disimpulkan bahwa penguasaan mencapai 75%.

5) *Electric & electronic system*

a) Dari 3 bagian komponen *sub-sub* sistem telah dikuasai 1 item dan 2 item tier 2

b) Hasil analisis : *Electric & electronic system* telah dikuasai sebagian (1 dari 3 item), disimpulkan bahwa penguasaan mencapai 33%.

6) *Hydraulic system*

a) Dari 1 bagian komponen *sub-sub* sistem telah dikuasai

b) Hasil analisis : *Hydraulic system* telah dikuasai semua, dapat disimpulkan penguasaan mencapai 100%.

Selain itu, kemandirian industri pertahanan dapat diukur melalui Tingkat Kesiapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang disingkat TKT, berdasarkan Peraturan Menteri Ristekdikti No 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi, maka setiap hasil kegiatan riset dan pengembangan teknologi harus diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh industri pertahanan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesiapan teknologi yaitu tingkat kesiapterapan teknologi (TKT). TKT dibagi dalam skala 1 sampai dengan 9.<sup>97</sup>

Dari dasar pengukuran tersebut maka yang didapatkan dalam hasil pengembangan teknologi *medium tank* atas tercapainya telah mencapai pada skala 8 yaitu menunjukkan sistem

---

<sup>97</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

yang telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, hal tersebut terbukti dengan lulusnya pengujian *mine blast, endurance dan firing test* oleh Dislitbangad dan belum pada skala tertinggi yaitu skala 9 yang menunjukkan sistem benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan pengoperasian dikarenakan belum pada tahap yang digunakan oleh TNI AD dalam kegiatan mendukung operasi.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Dalam Pengembangan Tank Tahun 2019-2022, yang dimana tujuan dari pengembangan program teknologi lanjutan *medium tank* adalah kerjasama memproduksi bersama (*joint production*) kendaraan jenis tank medium bersama Turki melalui perusahaan FNSS *Defence System* yang selanjutnya hak kekayaan intelektual akan menjadi milik kedua negara. Hal tersebut sejalan dengan teori Mulyadi yang mengemukakan bahwa produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan.<sup>99</sup>

PT. Pindad dan FNSS secara bersama menyelesaikan pemesanan tahap awal untuk TNI AD sejumlah 18 unit dimana 10 unit dikerjakan oleh FNSS dan 8 unit akan dikerjakan oleh PT. Pindad yang semuanya akan diselesaikan pada tahun 2023. Sementara menurut Halim menyatakan bahwa produk bersama (*joint products*) yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara serempak dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja dan *overhead* pabrik yang sama, yang tidak dapat dilacak atau dibedakan/dipisahkan pada setiap produk dan mempunyai nilai jual atau kuantitas produk relative sama.<sup>100</sup>

PT. Pindad dalam melaksanakan pengembangan teknologi medium tank dengan keterbatasan fasilitas *engineering* yang dimiliki baik berupa *hardware* maupun *software* yang dapat diatasi dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh FNSS, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dalam kerjasama *joint production* maupun dalam *joint development*, serta keterbatasan SDM tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Pindad, maka diatasi melalui *assessment* dan melalui program alih teknologi, lalu pengiriman SDM ke Turki untuk

---

<sup>98</sup> Yulia Putri Damayanti. (2012). Simulasi Temperature Control System pada Internal Flow Fluida Viscous dengan Menggunakan Perangkat Lunak Cfd (Computational Fluid Dynamics) Studi Kasus Temperature Control System Tipe II untuk Lini Produksi Kecap PT. Lombok Gandaria.

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia*, 2(1).

<sup>100</sup> PT. Pindad. (2018). Pindad Lakukan Uji Ledak Ranjau Tank Medium di Batujajar. [PT. Pindad \(Persero\) - Pindad Lakukan Uji Ledak Ranjau Tank Medium Di Batujajar](#). Diakses pada 12 Juli 2023.

melaksanakan *Transfer of Technology* baik dalam bidang manajemen proyek, bidang desain dan *engineering*, bidang manufaktur, bidang pengadaan dan bidang *quality assurance*.<sup>101</sup>

Dalam membangun medium tank harimau PT. Pindad dan FNSS melakukan TOT dari penguasaan teknologi pembuatan tank dari FNSS, sedangkan FNSS berkepentingan untuk pembuatan tank jenis medium. Didalam konsep pengembangan teknologi, telah dilakukan studi literatur untuk menuju kebutuhan pengguna dengan teknologi yang mumpuni dalam penggunaan fungsi produk selama 20 tahun mendatang.<sup>102</sup>

Prosedur pengembangan program teknologi lanjutan medium tank melibatkan berbagai pihak dalam proses pengujian. Pengujian dilakukan oleh pihak PT. Pindad dan FNSS yang dilanjutkan pengujian oleh internal perusahaan melalui bagian *quality assurance*. Masuk pada tahap selanjutnya, sertifikasi dilakukan oleh Dislitbangad berupa sertifikasi uji coba produk dengan hasil berbentuk sertifikat lulus uji. Hasil akhir program dibagi menjadi dua yaitu dilihat dari kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini hasil akhir berupa *prototype medium tank*, kualitas dapat dilihat dari kesesuaian pemenuhan kebutuhan (opsrek) dan spesifikasi teknis (spektek) dari ketentuan standar umum yang berlaku, kesesuaian dapat dinilai dan ditentukan dari uji coba yang dilakukan terhadap *prototype* tersebut, seperti uji ledak, uji tembak, dan uji *endurance*. Sedangkan kuantitas adalah ketercapaian jumlah target yaitu dua buah *prototype*, *prototype* pertama di selesaikan di Turki dan yang kedua dikembangkan di Indonesia. Dari spesifikasi yang ada produknya dapat dinyatakan lulus uji oleh Dislitbangad. Pada beberapa uji yang dilakukan ternyata melibatkan semua pihak antara lain Tim Teknis PT Pindad, Tim Teknis FNSS Turki, Tim Teknis CMI Belgia, Tim Teknis Dislitbangad, Tim Teknis Pussenkav, serta Tim Asistensi Kemhan RI.<sup>103</sup>

Permasalahan yang terdapat pada peningkatan alutsista tersebut adalah :<sup>104</sup>

- 1) perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pada penguasaan teknologi 3 bagian yang masih pada *tier 2* yang dimana penguasaan teknologi masih dikuasai oleh mitra.

---

<sup>101</sup> Benni, Sarah, Bimantoro, Tato, Anugerah & Maukar. (2023). *Refleksi Politik Internasional Kontemporer Gatot Subroto Kav. 97*. Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi.

<sup>102</sup> Bagas Fakhrais Al Kautsar. (2021). *Strategi Indonesia Dalam Rangka Kemandirian Dan Peningkatan Kapabilitas Industri Alat Utama Sistem Persenjataan Tahun 2011-2019* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

<sup>103</sup> PT. Pindad. (2018). Pindad Sambut Medium Tank Yang Telah Lalui Serangkaian Uji. [PT. Pindad \(Persero\) - Pindad Sambut Medium Tank Yang Telah Lalui Serangkaian Uji](#). Diakses pada 12 Juli 2023.

<sup>104</sup> Yulia Nur Anissa, & Yusa Djuyandi. (2021). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Minimum Essential Froce (Mef) Dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (Tni). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 34-55.

- 2) Perlunya penambahan SDM tenaga ahli melalui rekrutmen dan peningkatan kemampuan SDM yang ada saat ini.
- 3) Perlunya melibatkan industri- industri pertahanan dalam negeri baik BUMN maupun BUMS dalam pengembangan program teknologi lanjutan medium tank, sehingga kekurangan yang ada dapat diatasi dengan cara konsorsium untuk menghasilkan alutsista yang sempurna dengan tujuan mencapai kemandirian industri pertahanan.
- 4) Perlunya meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan Kemhan.
- 5) Perlunya pembuatan sistem portal komunikasi bersama antara PT Pindad, Ditekindhan, KKIP, Puslitbang Balitbang Kemhan dan Distlitbangad agar terjalin sistem yang terintegrasi bersama berupa akses bersama.
- 6) Pengadaan fasilitas sistem *engineering* yang dibutuhkan seperti yang dimiliki FNSS.
- 7) Pengadaan *software system* dan aplikasi yang dibutuhkan seperti yang dimiliki FNSS.

Dalam hal tersebut diyakini dapat meningkatkan pertahanan dalam negeri yang selama ini diusahakan pemerintah Indonesia selama beberapa tahun belakangan mulai dari jaman Presiden SBY hingga dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.

#### **4.2.3 Peningkatan Kerjasama Bilateral**

Pada 14 November 2022, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Nasional Republik Turki Hulusi Akar telah menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang kerja sama di bidang industri pertahanan. Penandatanganan ini terjadi setelah kedua Menteri melaksanakan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki di sela-sela KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali.<sup>105</sup>

MoU tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang industri pertahanan antara kedua negara. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek seperti penelitian dan pengembangan bersama, produksi dan *transfer* teknologi, pelatihan dan pendidikan militer,

---

<sup>105</sup> Kompas. (2022). Menhan Prabowo dan Menhan Turkiye Teken Kerja Sama Pertahanan di Sela Pertemuan KTT G-20 Bali. [Menhan Prabowo dan Menhan Turkiye Teken Kerja Sama Industri Pertahanan di Sela Pertemuan KTT G20 Bali \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Diakses pada 12 Juli 2023.

pertukaran informasi intelijen, dan kemungkinan kerjasama dalam proyek-proyek pertahanan strategis.<sup>106</sup>

Dengan menandatangani MoU ini, Indonesia dan Turki berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam industri pertahanan guna memperkuat kapabilitas pertahanan nasional masing-masing negara. Hal tersebut juga mencerminkan keinginan kedua negara untuk saling mendukung dan saling memperkuat dalam hal pertahanan, keamanan, dan stabilitas regional.<sup>107</sup>

Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi kedua negara dalam mengembangkan industri pertahanan, meningkatkan akses ke teknologi baru, dan memperkuat hubungan bilateral mereka di bidang pertahanan seperti di bidang alutsista negara.<sup>108</sup>

Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Republik Turki, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Turki, H.E. Mevlut Cavusoglu, menghasilkan penandatanganan tujuh *Memorandum of Understanding* (MoU). Berikut adalah gambaran umum mengenai MoU yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut :<sup>109</sup>

- 1) MoU di bidang industri pertahanan oleh Menhan Prabowo, MoU tersebut menandai kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam industri pertahanan. Isi dari MoU ini mungkin meliputi pertukaran teknologi, *transfer* teknologi, kolaborasi dalam produksi persenjataan, dan pengembangan industri pertahanan kedua negara.
- 2) MoU mengenai kerjasama riset teknologi dan inovasi oleh Kepala BRIN Laksana Trihandoko, MoU ini mencakup kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia dan mitra Turki dalam bidang riset teknologi dan inovasi. Tujuan MoU ini mungkin termasuk pertukaran pengetahuan, pengembangan proyek bersama, dan kolaborasi dalam penelitian dan inovasi.
- 3) MoU di bidang lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menyoroti MoU ini pada kerjasama antara Indonesia dan Turki dalam bidang lingkungan. Kemungkinan isinya mencakup kerja sama dalam pengelolaan

---

<sup>106</sup> Al-Fadhat & Effendi. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia-korea Selatan: Ketahanan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 373-392.

<sup>107</sup> Kementerian Pertahanan. (2015). Buku putih pertahanan Indonesia. *Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.

<sup>108</sup> Suoth, Mamentu & Tulung. (2018). Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan dan Keamanan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

<sup>109</sup> Kementerian Pertahanan. (2022). Turki dan Penandatanganan 7 MoU. <https://www.kemhan.go.id/poahan-development-working-group-ministrial-meeting-side-event-2022-harnessing-the-ecosystem-of-aerospace-industry-in-indonesia>. Diakses pada 12 Juli 2023.

sumber daya alam, konservasi lingkungan, perlindungan hutan, dan penanganan masalah lingkungan bersama.

4) MoU di bidang kehutanan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, pada MoU ini mencerminkan kerja sama antara kedua negara dalam bidang kehutanan. Isi MoU ini mungkin meliputi pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan Upaya bersama untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan.

5) MoU pada bidang Pembangunan, menunjukkan kerjasama antara Indonesia dan Turki dalam bidang pembangunan. Isi MoU ini mungkin meliputi kolaborasi dalam proyek infrastruktur, pertukaran pengetahuan teknis, dan kerja sama ekonomi untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kedua negara.

6) MoU pada bidang Bus Bertenaga Listrik, mencakup kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan dan penggunaan bus bertenaga listrik. Tujuannya adalah mempromosikan penggunaan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memfasilitasi pertukaran teknologi dan pengetahuan dalam pengembangan bus listrik.

7) MoU pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera yang disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hal ini menandai kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan jalan tol trans Sumatera. MoU ini menyoroti kerja sama antara kedua negara dalam pengembangan jalan tol yang membentang di pulau Sumatera. Isi dari MoU ini mungkin termasuk kolaborasi dalam perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan jalan tol tersebut. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, hadir sebagai saksi atas penandatanganan MoU ini.

Dalam pertemuan bilateral ini, Indonesia dan Turki menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor. Melalui penandatanganan MoU di bidang industri pertahanan, riset teknologi, lingkungan, kehutanan, pembangunan, transportasi berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur, kedua negara berharap dapat saling mendukung dan memperkuat hubungan bilateral mereka. Lebih lanjutnya mengenai setiap MoU, termasuk rincian implementasi, jadwal kerja, dan proyek konkret yang akan dilaksanakan, mungkin dapat ditemukan dalam dokumen resmi atau pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Turki setelah pertemuan bilateral tersebut.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Saru Arifin. (2022). *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki terus berkembang dengan kuat. Pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan hari ini, telah diumumkan kerja sama tingkat baru antara kedua negara. Kerja sama ini melibatkan pembentukan dewan kerja sama strategis tingkat tinggi antara Indonesia dan Turki. Langkah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara sejak terjalinnya kemitraan strategis Indonesia-Turki pada tahun 2012.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Turki semakin kuat dan meluas ke berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan. Kerja sama tingkat tinggi ini akan memperkuat kerja sama strategis antara kedua negara dalam bidang tersebut. Sejak tahun 2012 saja, Indonesia dan Turki telah menjalin kemitraan strategis sudah lama, hal tersebut menjadi dasar bagi kerja sama yang lebih era tantara kedua negara. Dengan pembentukan dewan kerja sama strategis tingkat tinggi, diharapkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Turki dapat diperdalam dan diperluas dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan budaya.<sup>112</sup>

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan merupakan momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mengidentifikasi bidang kerja sama baru yang dapat saling menguntungkan. Pada pertemuan antara kedua Presiden tersebut, kemungkinan akan membahas berbagai isu penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Selain itu, mereka juga akan mencari cara untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor yang menjadi fokus kedua negara.<sup>113</sup>

Beberapa bidang yang mungkin menjadi fokus pembahasan antara Indonesia dan Turki adalah perdagangan dan investasi, keduanya mungkin akan membahas upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara dan memfasilitasi investasi bilateral yang lebih besar.<sup>114</sup>

Kerjasama di sektor pertahanan dan keamanan juga dapat menjadi topik penting dalam pertemuan tersebut. Hal ini termasuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan di bidang

---

<sup>111</sup> Hardi Alunaza. (2021). Diplomasi Multilateral Uni Eropa. *Jurnal Satu Tahun Reviewnesia Menelisik Dunia dari Perspektif Hubungan Internasional*, 25.

<sup>112</sup> Kementerian Pertahanan. (2015). Buku putih pertahanan Indonesia. *Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.

<sup>113</sup> Aryojai Ardipandanto. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43-63.

<sup>114</sup> Chatib Basri. (2012). *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

pertahanan, pelatihan militer, kerja sama teknologi pertahanan, dan kemungkinan penjualan dan pembelian alat-alat pertahanan antara Indonesia dan Turki.<sup>115</sup>

Selain itu, pada kerja sama dalam sektor pariwisata juga dapat menjadi fokus utama pada pembahasan. Keduanya dapat menjajaki kemungkinan meningkatkan kunjungan wisatawan antara kedua negara, pertukaran program pariwisata, dan promosi destinasi wisata masing-masing negara. Untuk di sektor energi, Indonesia dan Turki dapat menjajaki potensi kerja sama dalam bidang energi terbarukan, pertukaran pengetahuan dan teknologi energi, serta kolaborasi dalam proyek-proyek energi yang saling menguntungkan. Peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur juga dapat menjadi bagian penting. Keduanya dapat membahas peluang investasi dan kolaborasi dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya.<sup>116</sup>

Selain itu, pada pertukaran pendidikan dan budaya antara Indonesia dan Turki juga dapat menjadi fokus pembicaraan. Upaya meningkatkan pertukaran pelajar dan akademisi, kolaborasi dalam penelitian, dan promosi budaya masing-masing negara yang dapat menjadi bagian dari agenda kerjasama bilateral. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret dan langkah-langkah nyata demi memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Turki dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pembentukan dewan kerja sama strategis tingkat tinggi, diharapkan kerja sama antara kedua negara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.<sup>117</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari peningkatan kerjasama bilateral adalah pada penandatanganan MoU antara Indonesia Turki kerjasama pemerintah ke pemerintah (G to G) dan bisnis ke bisnis (B to B). Diharapkan dapat menunjukkan hubungan yang erat antara kedua negara dan tingkat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Turki yang telah menghasilkan manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat kedua negara. MoU yang ditandatangani merupakan hasil dari proses yang berlangsung selama tiga tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama ini telah melalui tahap yang matang dan melibatkan beberapa upaya yang signifikan dari kedua belah pihak. Selanjutnya penandatanganan MoU ini dapat membuka pintu bagi lebih banyak peluang kerjasama di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan lainnya.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, & Muhammad Ashry Sallatu. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 43-67.

<sup>116</sup> Bachruddin Saleh Luturlean. (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Bandung: Humaniora Utama Press.

<sup>117</sup> Kementerian Keuangan. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983*.

<sup>118</sup> Yon Machmudi. (2021). *Timur Tengah Dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.



